

SKRIPSI

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG IZIN PENGUSAHAAN PENANGKARAN SARANG BURUNG WALET DI KECAMATAN TUALANG

**Diajukan Untuk Memenuhi Serta Melengkapi Syarat-syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Pada
Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri
Sultan Syarif Kasim Riau**



Oleh :

**HALIMAH
NIM. 10975007079**

**PROGRAM S1
JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA**

**FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU**

2013

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalammu'alaikum Wr. Wb

Segala puji bagi Allah SWT, yang telah mencurahkan segala rahmat-Nya kepada kita semua. Hanya kepada-Nya lah penulis memuji, meminta, dan memohon pertolongan serta mengharapakan hidayah, ridho dan ampunan-Nya.

Sholawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan alam, sang pelita alam dan pelopor perubahan dunia yang tidak pernah redup dari pentas kepemimpinan islam. Atas perjuangan beliau menegakkan kebenaran dan keadilan serta menjadikan kebatilan sebagai musuh abadi dalam kehidupan umat manusia, Dia adalah Baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga, serta sahabat. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di akhirat nanti. *Amin...*

Skripsi ini dibuat oleh penulis sebagai salah satu bentuk kewajiban dari setiap individu mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya pada Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yaitu dengan cara melakukan sebuah penelitian dan membuat hasilnya dalam bentuk karya ilmiah. Proses penelitian ini adalah tahap awal bagaimana pada setiap individu mahasiswa tersebut mengaktualisasikan kemampuannya yang pernah didapatkan pada bangku perkuliahan. Khususnya di Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial dan diimplementasikan pada dunia kerja apakah teori-teori yang didapatkan

sudah mampu menjawab segala permasalahan di kehidupan berbangsa dan bermasyarakat.

Penelitian tersebut guna menghasilkan karya ilmiah yang fundamental dalam menyelesaikan permasalahan yang ada dan mampu menjadi solusi bagi permasalahan-permasalahan tersebut.

Maka dari itu penulis sangat tertarik dalam melakukan penelitian tersebut, adapun judul dari penelitian penulis adalah **“Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 4 Tahun 2008 tentang Izin Pengusahaan Penangkaran Sarang Burung Walet di Kecamatan Tualang”**. Khusus dalam penulisan ini, penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kelemahan berupa kesalahan akibat keterbatasan penulis, baik dari segi konsep, teori atau yang lainnya. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran untuk kesempurnaan penulisan ini kedepannya.

Adapun dalam penelitian ini penulis telah banyak menerima kritikan, masukan, bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak yang sangat berguna dalam membangun dan menyukkseskan penelitian ini. Maka berangkat dari sana penulis ingin menyampaikan banyak terima kasih yang mana penulis tidak mampu untuk membalasnya semoga Allah SWT membalas dengan pahala yang berlipat ganda atas bantuan dan jasanya tersebut. Kemudian rasa terima kasih tersebut penulis sampaikan kepada :

1. Keluarga tercinta Ayahanda Hasan Basri, Ibunda Sabariah, Ayunda Rena Yuli, Ayunda Eka Susilawaty, Adinda Maisaroh, Sinta Vitriani, Sumi Yuliana Vita Sari, Candra Bukhari dan Rizky Rahmadani yang selalu memberikan motivasi dan do'a untuk kelancaran dalam penelitian ini. Nenekku Sari Banun (Almarhumah), Makwo Asni, Mamak Alif, Pak Bongsu Yanto dan Etek Warni, Abang Iparku Darman dan Suratno beserta keluarga besar lainnya terima kasih atas do'a yang telah diberikan kepada penulis selama ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Nazir, MA sebagai Rektor UIN SUSKA RIAU.
3. Bapak Dr. Mahendra Romus, SP.M.Ec sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.
4. Bapak Afrizal, S.Sos, M.Si sebagai Ketua Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.
5. Bapak Drs. Almasri, M.Si selaku pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak Afrinaldy Rustam, S.IP, M.Si selaku penasehat akademik dan pembimbing proposal yang telah memberikan arahan dalam penulisan proposal.
7. Bapak dan Ibu Dosen pengajar pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial khususnya Dosen pada jurusan Administrasi Negara.
8. Instansi-instansi terkait dalam penelitian penulis, yaitu : Dinas Kehutanan Kabupaten Siak/UPTD Dinas Kehutanan Kecamatan Tualang, Kantor

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP) Kabupaten Siak, UPTD Dinas Pendapatan Kecamatan Tualang dan Bapedalda Kabupaten Siak yang telah memberikan informasi dan data yang penulis perlukan.

9. Camat Tualang beserta staf yang telah memberikan izin, kemudahan dalam memperoleh data-data yang penulis perlukan.
10. Sahabat-sahabat tersayang, Elis, Fitri A, Anggi, Nuraliyah, Yanti, Afi dan Fatni, terimakasih atas kebersamaan selama ini semoga kita nantinya bisa hidup sukses dan menjadi sahabat untuk selamanya.
11. Kepada sahabat-sahabat ku Jurusan Administrasi Negara angkatan 2009, khususnya ANA C, Ayu Lestari, Wirda Afni, Dini Hariani, Wan Aisyah A.A, Fransiska, Fasiha, Reni, Dwi, Dewi, Dede, Herlina, Nur'ainina, Mustika, Yeni, Zai, Rudi, Riyan, Irfan, Sanusi dan sahabatku lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih karena telah bersedia untuk menjadi teman seperjuangan ku selama ini.
12. Kepada Kawan-kawan Gerakan Mahasiswa Peduli Kabupaten Siak (GMPKS), Bg Salman, Bg Aan, Bg Solihin, Bg Toni, Bg Ahmad Said, Bg Triono, kak Marfuah, Agus Suhaili, Bg Yudi, Bg Dodi, Hardi, Tono, Pawit, Nuri, Fije, Indra, Yuliana, Erma, Asmi, Riki, Maya, Hamim, Herman serta kader-kader GMPKS lainnya, terima kasih atas kebersamaannya selama ini.

Tiada kata yang pantas penulis ucapkan kepada semua pihak, selain “Jazakumullah Kairan Katsiran” semoga Allah SWT memberikan balasan dan kebaikan yang berlipat ganda. Amin ya Rabb...

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

Pekanbaru, Januari 2013

HALIMAH
NIM. 10975007079

ABSTRAK

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 4 Tahun 2008 tentang Izin Pengusahaan Penangkaran Sarang Burung Walet di Kecamatan Tualang.

OLEH : HALIMAH

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Tualang, Dinas Kehutanan Kabupaten Siak, Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP) Kabupaten Siak, dan Bapedalda Kabupaten Siak. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 4 Tahun 2008 tentang Izin pengusahaan penangkaran sarang burung walet ditetapkan untuk mengatur pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet, sekaligus demi mencapai keselarasan lingkungan, pelestarian satwa serta guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Siak. Namun setelah 4 tahun disahkan, Perda tersebut belum bisa terlaksana sebagaimana mestinya. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa penangkaran sarang burung walet yang ada di Kecamatan Tualang tidak berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan hal tersebut maka penulis membuat perumusan masalah: “Bagaimanakah Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 4 Tahun 2008 tentang izin pengusahaan penangkaran sarang burung walet di Kecamatan Tualang?”. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan terdiri atas teknik wawancara, kuesioner, dan observasi. Kemudian teknik analisa data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif kualitatif, yaitu data yang terkumpul diolah dan dianalisis dengan menguraikan serta mengaitkan dengan teori-teori yang sesuai dengan permasalahan yang ada, dan ditabulasi sesuai dengan susunan sajian data yang dibutuhkan untuk menjawab masing-masing masalah, lalu memberikan interpretasi terhadap hasil yang relevan, kemudian diambil kesimpulan dan saran.

Hasil penelitian mendapatkan fakta bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 4 Tahun 2008 tentang izin pengusahaan penangkaran sarang burung walet belum terlaksana dengan baik di Kecamatan Tualang dimana: Diketahui bahwa tanggapan responden yang menyatakan setuju dengan rata-rata 10 persentase 19,61 %, kemudian menyatakan cukup setuju rata-rata 3,5 dengan persentase 6,86 %, dan yang menyatakan tidak setuju dengan rata-rata adalah 37,5 persentase 73,53 %. Artinya Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 4 Tahun 2008 tentang izin pengusahaan penangkaran sarang burung walet di Kecamatan Tualang belum terlaksana dengan baik.

Keyword : Perizinan, Pemanenan, Pengawasan dan Pengendalian, dan Kewajiban.

DAFTAR ISI

LEMBARAN PERSETUJUAN

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Perumusan Masalah	12
1.3 Tujuan Penelitian	12
1.4 Manfaat Penelitian	12
1.5 Sistematika Penulisan	13

BAB II TELAAH PUSTAKA 15

2.1 Kebijakan Publik	15
2.2 Implementasi Kebijakan	18
2.3 Faktor Keberhasilan Implementasi	19
2.4 Faktor Penghambat Implementasi	22
2.5 Peraturan daerah (Perda)	24
2.6 Pandangan Islam	27
2.7 Hipotesis	29
2.8 Definisi Konsep	30
2.9 Konsep Operasional	31
2.10 Variabel Penelitian	32

2.11 Teknik Pengukuran	34
2.12 Kerangka Pemikiran	37
BAB III METODE PENELITIAN	39
3.1 Jenis Penelitian	39
3.2 Waktu dan Tempat Penelitian.....	39
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	39
3.4 Teknik Pengumpulan Data	40
3.5 Populasi dan Sampel.....	42
3.6 Analisa Data.....	43
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	45
4.1 Sejarah Kabupaten Siak	45
4.2 Gambaran Umum Kecamatan Tualang	46
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	50
5.1 Identitas Responden.....	50
5.1.1 Responden Menurut Jenis Kelamin.....	50
5.1.2 Responden Menurut Tingkat Usia.....	51
5.1.3 Responden Menurut Tingkat Pendidikan	52
5.2 Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 4 Tahun 2008 tentang izin pengusahaan penangkaran sarang burung walet di Kecamatan Tualang	53
5.2.1 Perizinan	55
5.2.2 Pemanenan.....	68
5.2.3 Pengawasan dan Pengendalian	74
5.2.4 Kewajiban.....	82
5.3 Rekapitulasi Jawaban Responden Per Indikator	87
5.4 Rekapitulasi Keseluruhan Quesioner.....	94

BAB VI PENUTUP	97
6.1 Kesimpulan	97
6.2 Saran	100

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah penangkaran sarang burung walet yang terdaftar di Kecamatan Tualang tahun 2012	8
Tabel 1.2	Data pengusaha penangkaran sarang burung walet yang belum memiliki izin usaha di Kecamatan Tualang tahun 2012	9
Tabel 3.1	Penetapan populasi dan sampel	43
Tabel 4.1	Daftar luas wilayah Kecamatan Tualang tahun 2011	47
Tabel 4.2	Jumlah penduduk Kecamatan Tualang berdasarkan Desa/Kelurahan pada tahun 2011.....	49
Tabel 5.1	Responden menurut jenis kelamin	51
Tabel 5.2	Responden menurut tingkat usia.....	52
Tabel 5.3	Responden menurut tingkat pendidikan.....	53
Tabel 5.4	Tanggapan Responden Mengenai sudah mengurus dan memiliki perizinan usaha penangkaran sarang burung walet...	57
Tabel 5.5	Tanggapan responden mengenai lokasi penangkaran sarang burung walet di Kecamatan Tualang sudah sesuai dengan lokasi prioritas.....	64
Tabel 5.6	Tanggapan Responden Mengenai tempat pengusahaan penangkaran sarang burung walet berjarak minimal dari pusat kota kecamatan 3 Km dan 500 M dari fasilitas umum dan fasilitas sosial.....	65
Tabel 5.7	Tanggapan Responden Mengenai pengusaha walet melakukan pemanenan sarang burung walet sesuai dengan waktu yang ditentukan.....	69

Tabel 5.8	Tanggapan Responden Mengenai pengusaha walet melakukan pemanenan sarang burung walet menggunakan metode panen tetasan.....	70
Tabel 5.9	Tanggapan Responden Mengenai pengusaha walet melakukan pemanenan sarang burung walet menggunakan metode panen rampasan.....	71
Tabel 5.10	Tanggapan Responden Mengenai pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan teknis pengusahaan oleh Dinas kehutanan.....	76
Tabel 5.11	Tanggapan responden mengenai pengawasan dan pengendalian terhadap dampak lingkungan oleh Bapedalda.....	78
Tabel 5.12	Tanggapan Responden Mengenai mendapatkan sosialisasi dari Pemerintah Daerah terkait Perda Nomor 4 Tahun 2008.....	81
Tabel 5.13	Tanggapan Responden Mengenai telah membuat dan menyampaikan laporan berkala setiap 6 bulan sekali kepada Dinas Kehutanan.....	83
Tabel 5.14	Tanggapan Responden Mengenai telah membuat dan menyampaikan laporan berkala setiap 6 bulan sekali kepada Bapedalda.....	84
Tabel 5.15	Tanggapan Responden Mengenai setiap pemanenan sarang burung walet telah dicatat dan dilaporkan kepada Dinas Kehutanan	86
Tabel 5.16	Rekapitulasi tanggapan responden mengenai perizinan.....	88
Tabel 5.17	Rekapitulasi Tanggapan Responden mengenai pemanenan	89
Tabel 5.18	Rekapitulasi tanggapan Responden Mengenai pengawasan dan pengendalian.....	91

Tabel 5.19	Rekapitulasi tanggapan Responden Mengenai kewajiban	93
Tabel 5.20	Rekapitulasi keseluruhan quesjoner penelitian.....	94

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1.1 Prosedur pengajuan izin penangkaran sarang burung walet.....	5
2.1 Bagan kerangka pemikiran penelitian mengenai implementasi Perda Kabupaten Siak Nomor 4 Tahun 2008 tentang izin pengusahaan Penangkaran sarang burung walet di Kecamatan Tualang.....	38

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Reformasi pemerintahan telah menyebabkan terjadi pergeseran-pergeseran paradigma penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mendirikan daerah dan pemberdayaan masyarakat. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah telah mengubah paradigma sentralisasi pemerintahan ke arah desentralisasi dengan pemberian otonomi daerah.

Kemudian, undang-undang ini disempurnakan lagi dengan pemberlakuan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Esensi kebijakan otonomi daerah telah menempatkan kabupaten dan kota sebagai titik berat pelaksanaan otonomi memberikan harapan bagi setiap daerah untuk mengembangkan daerah sesuai dengan potensi. Melalui otonomi diharapkan Daerah lebih mandiri dalam menentukan seluruh kegiatannya dan pemerintah pusat tidak lagi terlalu aktif mengatur daerah. Pemerintah Daerah diharapkan mampu memainkan peranannya dalam membuka peluang memajukan daerah dengan melakukan identifikasi potensi sumber-sumber pendapatannya dan mampu menetapkan belanja daerah secara ekonomi yang wajar, efisien, efektif termasuk kemampuan perangkat daerah meningkatkan kinerja, mempertanggungjawabkan kepada pemerintah atasannya maupun kepada publik dan masyarakat. Selain itu, otonomi juga memberikan harapan bagi masyarakat untuk dapat menikmati pelayanan publik efektif dan efisien serta terwujudnya pemerataan pembangunan di berbagai aspek kehidupan. Artinya ada harapan bagi

masyarakat untuk memperoleh kebijakan-kebijakan daerah yang mengutamakan nasib mereka daripada hanya sekedar mengakomodasikan keinginan pemerintah pusat.

Pelaksanaan asas desentralisasi dibentuk dan disusun daerah provinsi, daerah kabupaten/kota yang berwenang mengatur dan mengurus segala kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Berdasarkan asas tersebut pemerintah pusat melimpahkan sebagian tugas dan wewenang urusan pemerintahannya kepada daerah, sehingga timbul hubungan fungsi, dalam arti ada tugas dan wewenang tertentu tetap dilaksanakan oleh pusat dan adapula tugas dan wewenang tertentu dilaksanakan oleh daerah sebagai akibat dari pelimpahan tugas dan wewenang dari pusat kepadanya.

Menurut Afrizal (2009:175) Secara teoritis desentralisasi memberikan dua manfaat yaitu : *pertama*, mendorong peningkatan partisipasi, prakarsa dan kreativitas masyarakat dalam pembangunan serta mendorong pemerataan hasil pembangunan diseluruh daerah dengan memanfaatkan sumber daya dan potensi yang tersedia dimasing-masing daerah. *Kedua*, memperbaiki alokasi sumber daya produktif melalui pergeseran peran pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintahan yang paling rendah karena memiliki informasi paling lengkap.

Dengan disahkannya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Siak tentang Izin Pengusahaan Penangkaran Sarang Burung walet pada tanggal 13 Maret 2008 di Siak Sri Indrapura merupakan wujud kongkrit otonomi daerah. Artinya telah ada pergeseran peran pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintahan paling bawah.

Mengingat sarang burung walet merupakan salah satu satwa liar yang dapat dimanfaatkan secara lestari untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap menjamin keberadaan populasinya di alam dan sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 100/KPTS-II/2003 tentang pedoman Pemanfaatan Sarang Burung Walet. Bahwa untuk mencapai keselarasan dalam pengawasan, pelestarian satwa guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dipandang perlu diatur pengusahaan penangkaran sarang burung walet tersebut, dimana sarang burung walet merupakan potensi alam yang dimanfaatkan oleh manusia sebagai suatu bahan makanan yang bermanfaat bagi kesehatan yang sejak lama diusahakan oleh masyarakat.

Tujuan perizinan usaha sarang burung walet yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Siak adalah untuk melakukan penertiban terhadap pengusaha burung walet agar tercipta tertib administrasi dan ketaatan pemilik usaha terhadap peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Siak dan membayar retribusi atas izin yang diberikan sebagai salah satu Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh.

Perizinan penangkaran walet adalah salah satu legalitas yang harus didapatkan oleh para pengusaha penangkaran sarang burung walet karena masalah perizinan penangkaran walet sudah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 4 Tahun 2008 dan diperkuat dengan Peraturan Bupati Siak Nomor 26 Tahun 2010. Dalam pengurusan izin pengusahaan penangkaran sarang burung walet, Pemerintah Daerah Kabupaten Siak memberikan wewenang kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Siak dan Kantor Pelayanan Terpadu

Satu Pintu (KPTSP) untuk mengurus dan memproses permohonan izin yang diajukan oleh pengusaha.

Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP) merupakan dinas yang diberikan wewenang dalam segala urusan perizinan, diantaranya sekitar 34 perizinan termasuk perizinan penangkaran walet. Sedangkan Dinas Kehutanan dan Perkebunan berwenang untuk memeriksa pertimbangan teknis lokasi penangkaran. Pertimbangan teknis tersebut berupa pertimbangan tentang lokasi penangkaran yang dilakukan oleh pengusaha yaitu penangkaran yang tidak melanggar Aturan Tata Ruang Daerah Kabupaten Siak. Apabila semuanya sudah lengkap dan penangkaran yang dilakukan oleh pengusaha walet tidak bertentangan dengan ketentuan Tata Ruang Daerah, maka Dinas Kehutanan dan Perkebunan akan memberikan rekomendasi kepada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP) untuk menerbitkan surat izin penangkaran walet.

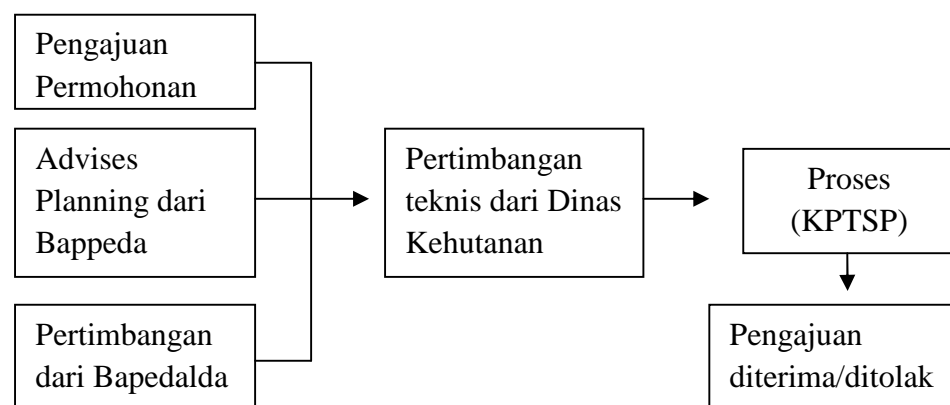
Untuk memperoleh izin perusahaan penangkaran walet pengusaha walet terlebih dahulu harus melengkapi persyaratan sebagaimana disebutkan pada pasal 13 yaitu, Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas Kehutanan dengan melampirkan:

- a. Surat permohonan;
- b. Advices planing dari Bappeda;
- c. Pertimbangan teknis dari Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA);
- d. Izin Mendirikan Bangunan;
- e. Izin Gangguan (HO);
- f. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- g. Akte Pendirian Perusahaan bagi badan usaha;
- h. Surat Izin Tempat Usaha (SITU);

- i. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
- j. Pertimbangan teknis dari Dinas Kehutanan Kabupaten Siak;
- k. Rekomendasi dari asosiasi Pengusaha burung walet yang telah disahkan oleh Pemerintah Daerah.

Sedangkan prosedur pengajuan izin penangkaran sarang burung walet seperti terlihat pada bagan berikut ini:

Gambar 1.1



Sumber: UPTD Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kecamatan Tualang

Dengan adanya peraturan daerah tersebut tidak menutup kemungkinan masih adanya pengusaha walet yang belum mempunyai izin atas usahanya tersebut. Permasalahan mengenai surat izin penangkaran sarang burung walet masih belum mampu diselesaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Siak. Belum satupun surat izin yang dikeluarkan untuk pengusaha yang telah mengajukan permohonan. Kendala tidak dikeluarkannya izin oleh Pemerintah Daerah salah satunya adalah terletak pada pertimbangan teknis lokasi yang dijadikan tempat usaha. Lokasi penangkaran yang dibangun oleh pengusaha tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu Dinas Kehutanan sebagai pihak yang bertanggung jawab pada teknis lokasi tidak memberikan rekomendasi kepada KPTSP untuk menerbitkan surat izin usaha tersebut. Sebagai pihak kedua

KPTSP tentunya tidak berani untuk mengeluarkan izin sebelum ada rekomendasi dari Dinas Kehutanan terkait perizinan walet ini. Apabila dalam hal permohonan tidak memenuhi persyaratan teknis, maka Kepala Daerah melalui Dinas Kehutanan wajib menerbitkan surat penolakan permohonan. Dengan demikian pemerintah harus mengambil tindakan terhadap penangkaran walet yang menyalahi aturan ini. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Perda Nomor 4 Tahun 2008 pada pasal 26 ayat 1 berbunyi setiap orang atau badan yang melanggar pasal 6, 7, 12, 19, dan pasal 24, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta). Namun hingga saat ini kita belum melihat kesungguhan dari Pemerintah daerah untuk melaksanakan Perda tersebut. Hal inilah yang membuat Perda Nomor 4 Tahun 2008 tentang izin pengusahaan penangkaran sarang burung walet belum terlaksana.

Pihak pemerintah harus dapat menyusun suatu kebijakan yang tepat dan dapat diimplementasikan secara maksimal dalam kondisi nyata. Karena bagaimanapun baiknya suatu kebijakan, tidak akan memberikan manfaat yang optimal bagi pemerintah maupun masyarakat apabila kebijakan tersebut tidak dapat diterapkan.

Kabupaten Siak merupakan daerah potensial untuk pengembangan dan budidaya sarang burung walet. Penangkaran sarang burung walet di Kabupaten Siak tidak hanya berada di Ibukota Kabupaten Siak. Melainkan telah menyebar di beberapa wilayah kecamatan. Salah satu kecamatan yang banyak terdapat usaha penangkaran sarang burung walet adalah Kecamatan Tualang.

Penangkaran sarang burung walet di Kecamatan Tualang tidak sesuai dengan peraturan daerah. Hal ini dikarenakan masih banyak pengusaha penangkaran sarang burung walet membangun penangkaran yang berada dilokasi pelarangan. Seharusnya pengusaha memahami Perda tepatnya pada pasal 6 berbunyi “Seluruh wilayah Kabupaten Siak terbuka untuk pengusahaan dan penangkaran sarang burung walet dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Lokasi untuk penangkaran sarang burung walet yang bersifat buatan telah diatur dalam peraturan daerah. Lokasi khusus adalah daerah-daerah atau tempat-tempat yang ditetapkan oleh Bupati untuk menghindarkan masyarakat banyak sejauh mungkin dari dampak negatif akibat pencemaran, polusi, kotoran dan hama penyakit. Dalam Peraturan Bupati Nomor 26 tahun 2010 tentang Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 4 tahun 2008 tentang izin pengusahaan penangkaran sarang burung walet dalam Bab II Pasal 2 dan Pasal 3 tentang kriteria lokasi penangkaran sarang burung walet adalah :

1. Jarak minimal dari pusat kota kecamatan 3 Km dan 500 m dari fasilitas umum dan fasilitas sosial.
2. Kepadatan penduduk rendah sampai sedang dan
3. Lahan terlantar dan atau bukan lahan produktif.

Untuk Kecamatan Tualang sendiri lokasi prioritas penangkaran sarang burung walet sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2010 yaitu berlokasi di Desa Tualang, Desa Pinang Sebatang Barat, dan Desa Pinang Sebatang Timur. Sedangkan kondisi lapangan yang banyak

terdapat penangkaran sarang burung walet yaitu di wilayah kelurahan Perawang dan Desa Perawang Barat. Padahal di Kelurahan Perawang dan Desa Perawang Barat tersebut pemukiman masyarakat sangat padat. Selain daripada itu, di kelurahan Perawang termasuk ibukota bagi Kecamatan Tualang. Jika dilihat dari sisi negatifnya maka penangkaran sarang burung walet yang berada di tengah-tengah pemukiman masyarakat dapat berakibat mengganggu ketentraman dan kesehatan lingkungan, termasuk; menimbulkan polusi udara, polusi suara dan dapat mengundang banyak nyamuk.

Kecamatan Tualang terdiri atas 1 Kelurahan dan 7 Desa. Namun penangkaran sarang burung walet terpusat di Ibukota Kecamatan yaitu Kelurahan Perawang sebanyak 10 usaha dan sisanya sebanyak 7 usaha lainnya berada di Desa Perawang Barat. Sedangkan 6 Desa lainnya memang tidak ada usaha penangkaran sarang burung walet. Dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1 Jumlah Penangkaran Sarang Burung Walet di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak

No	Desa/Kelurahan	Jumlah Penangkaran
1	Kelurahan Perawang	10 usaha
2	Perawang Barat	7 usaha
3	Tualang	-
4	Pinang Sebatang	-
5	Pinang Sebatang Timur	-
6	Pinang Sebatang Barat	-
7	Maredan	-
8	Maredan Barat	-
Jumlah		17 Usaha

Sumber : UPTD Dinas Pendapatan Kecamatan Tualang Tahun 2012

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa para pengusaha walet tidak mengindahkan peraturan yang mengatur tentang kriteria lokasi dan lokasi prioritas penangkaran sarang burung walet yang diperuntukkan bagi wilayah Kecamatan Tualang sebagaimana yang telah diatur di dalam Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2010 tepatnya pada pasal 2 dan pasal 3. Selain daripada itu pengusaha walet ini tidak memiliki izin atas usahanya tersebut.

Berdasarkan data dari UPTD Dinas Pendapatan daerah Kecamatan Tualang Kabupaten Siak pada tahun 2012 tercatat sebanyak 17 nama pengusaha penangkaran sarang burung walet yang tidak memiliki izin usaha untuk wilayah Kecamatan Tualang. Dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.2 Data pengusaha penangkaran sarang burung walet yang tidak memiliki izin usaha di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak

No	Nama Pengusaha Walet	Alamat	Lokasi/Tempat
1	Kho Kha Siong	Jln. Raya Km 5	Perawang
2	Siau Ling	Jln. Raya Km 4	Perawang
3	Ahok	Jln. M. Ali	Perawang Barat
4	Salon Wella	Km 5,5 Perawang	Perawang
5	Martono	Jln. Raya Km 8	Perawang Barat
6	Lili Ana	Jln. Raya Km 6	Perawang
7	Jhony King	Km 4 Perawang	Perawang
8	Hock Lai	Jln. M.Yamin	Perawang Barat
9	Johan	Jln. A.R. Hakim	Perawang Barat
10	Agus	Jln. Raya Km 5	Perawang
11	Sinar Mitra	Jln. A.R. Hakim	Perawang Barat
12	Sufianto	Jln. Raya Km 5	Perawang
13	Yanto	Jln. Raya Km 5	Perawang Barat
14	Heri Susanto	Km 5 Perawang	Perawang
15	Tk. Gemilang	Jln. A.R. Hakim	Perawang Barat
16	Widodo	Km 5 Perawang	Perawang
17	Candrayu	Km 6 Perawang	Perawang

Sumber: UPTD Dinas Pendapatan daerah Kecamatan Tualang

Dari tabel diatas dapat kita ketahui bahwa pengusaha penangkaran sarang burung walet tidak memiliki izin usaha. Hal ini dikarenakan penangkaran yang dibangun oleh pengusaha walet banyak terdapat di pusat kota kecamatan dan berada pada kepadatan penduduk tinggi yaitu di Kelurahan Perawang dan Desa Perawang Barat. Sehingga tidak bisa memenuhi persyaratan untuk memperoleh izin atas usaha penangkaran waletnya tersebut. Sebagaimana telah disebutkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 4 Tahun 2008 pada pasal 7 yang berbunyi “Setiap pengusaha penangkaran sarang burung walet di habitat buatan berkewajiban mematuhi ketentuan Rencana Tata Ruang Kabupaten Siak, seperti peruntukan pelabuhan udara, perkantoran, kawasan industri serta kawasan pemukiman yang padat penduduknya, perdagangan, perekonomian dan kawasan pasar.”

Untuk mencari kebenaran tentang hal tersebut maka penulis melakukan wawancara dengan Kepala UPTD Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kecamatan Tualang Bapak Agus Syamsir. Berikut ini adalah kutipan langsung dari hasil wawancara penulis dengan Bapak Agus Syamsir pada tanggal 24 Oktober 2012 :

“Sampai saat ini Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 4 Tahun 2008 tentang izin pengusaha penangkaran sarang burung walet belum bisa dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, hal ini dikarenakan isi dari kebijakan tersebut masih rancu dan penuh dengan kepentingan politik.”

Kemudian penulis juga melakukan wawancara langsung kepada salah seorang pegawai UPTD Dinas Pendapatan Kecamatan Tualang Bapak Aripin. Berikut ini adalah kutipan langsung dari hasil wawancara penulis dengan Bapak Aripin pada tanggal 24 Oktober 2012 :

“Pengusaha Walet yang ada di Kecamatan Tualang ini telah Melanggar Perda Nomor 4 Tahun 2008. Bisa kita lihat dari lokasi penangkaran waletnya. Saya melihat banyak sekali yang membangun penangkaran di daerah perkotaan dan padat pemukiman penduduk. Perda ini memang tidak berdaya mengatur pengusaha-pengusaha walet yang ada.”

Peraturan daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Izin pengusahaan penangkaran sarang burung walet ditetapkan untuk mengatur pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet, sekaligus demi mencapai keselarasan lingkungan, pelestarian satwa serta guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Siak.

Kenyataan yang terjadi di lapangan tidaklah sesuai dengan apa yang telah diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Siak. Usaha penangkaran sarang burung walet yang dilakukan oleh para pengusaha tidak mengacu kepada aturan yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 4 Tahun 2008.

Dari uraian diatas sudah empat tahun Perda ditetapkan, Terlihat jelas bahwa Pemerintah Kabupaten Siak tidak konsisten terhadap kebijakan yang telah dibuatnya. Jika permasalahan seperti ini terus berlanjut maka Perda Nomor 4 Tahun 2008 tentang izin pengusahaan penangkaran sarang burung walet tidak akan terlaksana.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian tentang : **Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 4 Tahun 2008 tentang Izin Pengusahaan Penangkaran Sarang Burung Walet di Kecamatan Tualang.**

1.2 Perumusan Masalah

Sehubungan dengan uraian yang terdapat pada latar belakang, yang menjelaskan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 4 Tahun 2008 tentang Izin Pengusahaan Penangkaran Sarang burung Walet sampai saat ini belum terlaksana sepenuhnya. Walaupun Perda tersebut telah disahkan sejak empat tahun yang lalu namun sampai sekarang belum juga terealisasi. Mencermati kondisi tersebut, dapatlah dirumuskan permasalahan yang menjadi dasar kajian dalam penelitian ini adalah

“Bagaimanakah implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 4 Tahun 2008 tentang Izin pengusahaan penangkaran sarang burung walet di Kecamatan Tualang?”

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 4 Tahun 2008 tentang Izin pengusahaan penangkaran sarang burung walet di Kecamatan Tualang.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Guna Praktis, penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan masukan dan koreksi bagi pihak berwenang baik itu pembuat kebijakan (pemerintah) maupun pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 4 Tahun 2008 tentang izin pengusahaan penangkaran sarang burung walet.

2. Guna Akademis, penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah referensi kepustakaan di Fakultas ekonomi dan Ilmu Sosial khususnya dan Universitas pada umumnya.
3. Guna Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memacu perkembangan ilmu administrasi negara minimal dapat memperkaya inventaris hasil-hasil penelitian di bidang administrasi negara.

1.5 Sistematika Penulisan

Muatan proposal ini disusun menjadi beberapa bab dan masing-masing bab dibagi menjadi sub bab dengan uraian sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bagian ini merupakan pendahuluan di mana dikemukakan hal-hal yang mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TELAAH PUSTAKA

Merupakan bab yang berisikan tentang beberapa teori yang berhubungan dengan masalah penelitian yang akan diteliti yaitu mengenai pengertian atau definisi kebijakan, implementasi kebijakan, peraturan daerah, pandangan islam mengenai kebijakan, hipotesis, definisi konsep, konsep operasional, kerangka berfikir teknik pengukuran, dan variabel penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini digunakan untuk menguraikan lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, dan diakhiri dengan analisa data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang keadaan umum kondisi geografis dan monografi Kecamatan Tualang sebagai lokasi penelitian.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Didalam bab ini memuat hasil dari penelitian dan pembahasan yang dilakukan.

BAB VI : PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup, yang berisikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran yang diperlukan.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Kebijakan Publik

Kebijakan publik menurut Chandler dan Plano adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber-sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah publik atau pemerintah. (Harbani Pasalong : 2008:38)

Menurut Thomas R. Dye kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Dye mengatakan bahwa bila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus ada tujuannya (objeknya) dan kebijakan publik itu meliputi semua tindakan pemerintah, jadi bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja. Disamping itu sesuatu yang tidak dilaksanakan oleh pemerintah pun termasuk kebijaksanaan negara. Hal ini disebabkan karena “sesuatu yang tidak dilakukan” oleh pemerintah akan mempunyai pengaruh (dampak) yang sama besarnya dengan “sesuatu yang dilakukan” oleh pemerintah. (Edi Suharto, 2005:44)

David Easton (Miftah Thoha, 2003:62) mendefinisikan bahwa kebijakan publik adalah alokasi nilai otoritatif untuk seluruh masyarakat, akan tetapi hanya pemerintahlah yang dapat berbuat secara otoritatif untuk seluruh masyarakat, dan semuanya yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau untuk tidak dikerjakan adalah hasil-hasil dari alokasi nilai-nilai tersebut.

William N. Dunn (Kristian Widya W, 2006) mengatakan kebijakan publik adalah pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif

yang saling tergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah.

Edwards dan Ira Sharkansky (Irfan Islamy, 2003:18) kemudian mengatakan bahwa kebijaksanaan negara itu dapat ditetapkan secara jelas dalam peraturan-peraturan perundang-undangan atau dalam bentuk pidato-pidato pejabat teras pemerintah ataupun berupa program-program dan tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah.

Untuk memahami berbagai definisi kebijakan publik, ada baiknya jika kita membahas beberapa konsep kunci yang termuat dalam kebijakan publik yaitu:

1. Tindakan pemerintah yang berwenang. Kebijakan publik adalah tindakan yang dibuat dan diimplementasikan oleh badan pemerintah yang memiliki kewenangan hukum, politis dan finansial untuk melakukannya.
2. Sebuah reaksi terhadap kebutuhan dan masalah dunia nyata. Kebijakan publik berusaha merespon masalah atau kebutuhan kongkrit yang berkembang di masyarakat.
3. Seperangkat tindakan yang berorientasi pada tujuan. Kebijakan publik biasanya bukanlah sebuah keputusan tunggal, melainkan terdiri dari beberapa pilihan tindakan atau strategi yang dibuat untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan orang banyak.
4. Sebuah keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kebijakan publik pada umumnya merupakan tindakan kolektif untuk

memecahkan masalah sosial. Namun, kebijakan publik bisa juga dirumuskan berdasarkan keyakinan bahwa masalah sosial akan dapat dipecahkan oleh kerangka kebijakan yang sudah ada dan karenanya tidak memerlukan tindakan tertentu.

5. Sebuah justifikasi yang dibuat oleh seorang atau beberapa orang aktor. Kebijakan publik berisi sebuah pernyataan atau justifikasi terhadap langkah-langkah atau rencana tindakan yang telah dirumuskan, bukan sebuah maksud atau janji yang belum dirumuskan. Keputusan yang telah dirumuskan dalam kebijakan publik bisa dibuat oleh sebuah badan pemerintah, maupun oleh beberapa perwakilan lembaga pemerintah.

Merujuk uraian definisi kebijakan publik diatas dapat dikatakan bahwa :

- 1) kebijakan publik harus berorientasi kepada kepentingan publik, 2) kebijakan publik dibuat oleh pemerintah yang berupa tindakan-tindakan pemerintah, 3) kebijakan publik adalah tindakan pemilihan alternatif untuk dilaksanakan atau tidak untuk dilaksanakan oleh pemerintah demi kepentingan publik.

Jadi idealnya suatu kebijakan publik adalah 1) kebijakan publik untuk dilaksanakan dalam bentuk rill, bukan untuk sekedar dinyatakan, 2) kebijakan publik untuk dilaksanakan atau tidak dilaksanakan karena didasarkan pada kepentingan publik itu sendiri.

Pada umumnya kebijakan dapat dibedakan atas empat bentuk, yaitu : 1) Regulatory, yaitu mengatur perilaku orang, 2) Redistributive, yaitu mendistribusikan kembali kekayaan yang ada, atau mengambil kekayaan dari

yang kaya lalu memberikannya kepada yang miskin, 3) Distributive, yaitu melakukan distribusi atau memberikan akses yang sama terhadap sumber daya tertentu, dan 4) Constituent, yaitu ditujukan untuk melindungi negara.

2.2 Implementasi Kebijakan

Beberapa pendapat para ahli yang dikutip dari dalam buku (Harbani pasalong, 2008) Implementasi kebijakan menurut Bernadine R. Wijaya dan Susilo Supardo adalah proses mentransformasikan suatu rencana ke dalam praktik.

Hinggis mendefinisikan implementasi sebagai rangkuman dari berbagai kegiatan yang di dalamnya sumber daya manusia menggunakan sumber daya lain untuk mencapai sasaran strategi.

Pendapat yang tidak jauh berbeda di ungkapkan oleh Gordon, implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program. Menurut Wibawa implementasi kebijakan merupakan pengejawantahan keputusan mengenai kebijakan yang mendasar, biasanya tertuang dalam undang-undang namun juga dapat berbentuk instruksi-instruksi eksekutif yang penting atau keputusan perundangan. Idealnya keputusan-keputusan tersebut menjelaskan masalah-masalah yang hendak ditangani, menentukan tujuan yang hendak dicapai dan dalam berbagi cara menggambarkan struktur proses implementasi tersebut.

Van Meter dan Van Horn (Solichin Abdul Wahab, 2004:65) merumuskan proses implementasi ini sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/ pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.

Berdasarkan uraian di atas, jadi implementasi itu merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan. Akan tetapi pemerintah dalam membuat kebijakan juga harus mengkaji terlebih dahulu apakah kebijakan tersebut dapat memberikan dampak yang buruk atau tidak bagi masyarakat, Hal tersebut bertujuan agar suatu kebijakan tidak bertentangan dengan masyarakat, apalagi sampai merugikan masyarakat.

2.3 Faktor keberhasilan implementasi

Sebagaimana telah dikatakan oleh pakar, bahwa proses implementasi kebijakan itu sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan pula menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku semua pihak yang terlibat dan yang pada akhirnya berpengaruh terhadap dampak, baik yang negatif maupun yang positif.

Oleh karena itu untuk mencapai keberhasilan daripada implementasi ini diperlukan kesamaan pandangan atas tujuan yang hendak dicapai dan komitmen semua pihak untuk memberikan dukungan bagi pelaksanaannya. Keberhasilan implementasi kebijakan ini dapat dilihat dari terjadinya kesesuaian antara pelaksanaan atau penerapan kebijakan dengan desain, tujuan dan sasaran kebijakan itu sendiri serta memberikan dampak atau hasil yang positif bagi pemecahan permasalahan yang dihadapi.

Asumsi yang dapat dibangun mengenai konsep keberhasilan implementasi kebijakan adalah “Semakin tinggi derajat kesesuaiannya maka semakin tinggi pula peluang keberhasilan kinerja implementasi kebijakan untuk menghasilkan output yang telah digariskan.

Menurut Meter dan Horn, merumuskan secara sederhana bahwa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi proses implementasi adalah faktor dukungan sumber daya, karakteristik pelaksanaan kebijakan, daya tanggap dan kemampuan untuk menyesuaikan diri.

Salah satu pendapat yang sangat singkat dan tegas tentang keberhasilan atau kegagalan dari implementasi kebijakan disampaikan oleh D. L. Weimer dan Aidan R. Vining (Harbani Pasalong, 2008), setelah mempelajari berbagai literatur tentang implementasi, menurut mereka ada tiga faktor umum yang mempengaruhi keberhasilan yaitu:

1. Logika yang digunakan oleh suatu kebijakan, yaitu sampai berapa benar teori yang menjadi landasan kebijakan atau seberapa jauh hubungan logis antara kegiatan-kegiatan yang dilakukan dengan tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan.
2. Hakekat kerjasama yang dibutuhkan, yaitu apakah semua pihak yang terlibat dalam kerjasama telah merupakan suatu assembling produktif.
3. Ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan, komitmen untuk mengelola pelaksanaannya.

Menurut Riant Nugroho (2006:179), pada prinsipnya ada empat tepat yang perlu dipenuhi dalam hal keefektifan implementasi kebijakan, yaitu :

1. Apakah kebijakan tersebut sudah tepat

Ketepatan kebijakan ini dinilai dari sisi; *Pertama*, sejauh mana kebijakan yang ada telah bermuatan hal-hal yang memang memecahkan masalah yang hendak dipecahkan. *Kedua*, apakah kebijakan tersebut sudah dirumuskan sesuai dengan karakter masalah yang hendak dipecahkan mengenai perumusan kebijakan. *Ketiga*, apakah kebijakan dibuat oleh lembaga yang mempunyai wewenang (misi kelembagaan) yang sesuai dengan karakter kebijakannya.

2. Tepat pelaksanaannya

Aktor implementasi kebijakan tidak hanya pemerintah, namun masih ada yang harus ikut berperan serta yaitu masyarakat dan swasta.

3. Tepat target

Ketepatan target berkenaan pada tiga hal, Yaitu : *Pertama*, apakah target yang diintervensi sesuai dengan yang direncanakan, apakah tidak ada tumpang tindih dengan intervensi lain atau tidak bertentangan dengan intervensi kebijakan lain. *Kedua*, apakah targetnya dalam kondisi siap untuk diintervensi atautkah tidak. Kesiapan bukan saja dalam arti secara alami, namun juga apakah kondisi target mendukung atau menolak. *Ketiga*, apakah intervensi implementasi kebijakan bersifat baru atau memperbaharui implementasi kebijakan sebelumnya. Terlalu banyak kebijakan yang tampaknya baru namun pada prinsipnya mengulang kebijakan lama

dengan hasil yang sama tidak efektifnya dengan kebijakan sebelumnya.

4. Tepat lingkungan

Ada dua lingkungan yang menentukan dalam implementasi kebijakan, yaitu : *Pertama*, lingkungan kebijakan yaitu lingkungan interaksi diantara lembaga perumus kebijakan dan pelaksanaan kebijakan dengan lembaga lain yang terkait. *Kedua*, lingkungan eksternal kebijakan yang juga sebagai variabel eksogen yang terdiri dari publik opinion yaitu persepsi publik dan implementasi kebijakan, interpretive intutions yang berkenaan interpretasi dari lembaga-lembaga strategis dalam masyarakat, seperti media massa, kelompok penekan dan kelompok kepentingan dalam menginterpretasikan kebijakan dan implementasi kebijakan dan individual yakni individu-individu tertentu yang mampu memainkan peranan penting dalam menginterpretasikan kebijakan dan implementasi kebijakan. Selain itu juga tepat lingkungan masih membutuhkan tiga jenis dukungan, yaitu dukungan politik, dukungan strategi dan dukungan teknis.

2.4 Faktor penghambat implementasi

Orang sering beranggapan bahwa implementasi hanya merupakan pelaksanaan dari apa yang telah diputuskan legislatif atau para pengambil keputusan, seolah-olah tahapan ini kurang berpengaruh akan tetapi dalam kenyataan dapat dilihat sendiri bahwa betapapun baiknya rencana yang telah

dibuat tetapi tidak ada gunanya apabila itu tidak dilaksanakan dengan baik dan benar.

Menurut J.A.M Marse (Tangkilisan, 2004:10), mengatakan bahwa ada beberapa faktor yang dapat menimbulkan kegagalan dalam implementasi suatu kebijakan, yaitu:

1. Isi kebijakan

Kebijakan dikatakan gagal karena masih samarnya isi dan tujuan dari kebijakan tersebut, tidak memiliki ketepatan dan ketegasan dalam bentuk internal maupun eksternal dari kebijakan itu sendiri.

2. Informasi

Terjadinya kekurangan informasi, maka dengan mudah mengakibatkan adanya gambaran yang kurang tepat, baik kepada objek kebijakan maupun kepada para pelaksana dari isi kebijakan yang akan dilaksanakan dan hasil-hasil daripada kebijakan tersebut.

3. Dukungan

Sebuah kebijakan akan sangat sulit dilaksanakan jika tidak ada dukungan dan partisipasi dari semua pihak yang terlibat dalam kebijakan tersebut.

4. Pembagian potensi

Yaitu pembagian potensi antara para aktor pelaksana dengan organisasi pelaksana yang berkaitan dengan deferensiasi tugas dan wewenang.

Artinya sebuah kebijakan tidak bisa lepas begitu saja. Kebijakan harus diawasi, dan salah satu mekanisme pengawasan tersebut disebut sebagai Evaluasi kebijakan. Evaluasi biasanya ditujukan untuk menilai sejauh mana keefektifan kebijakan guna dipertanggungjawabkan kepada konstituennya dimana tujuan telah tercapai. Evaluasi diperlukan untuk melihat kesenjangan antara harapan dan kenyataan yang terjadi di lapangan.

2.5 Peraturan Daerah (Perda)

Kewenangan membuat peraturan daerah (perda), merupakan wujud nyata pelaksanaan hak otonomi yang dimiliki oleh suatu daerah dan sebaliknya, peraturan daerah merupakan salah satu sarana dalam penyelenggaraan otonomi daerah.

Perda ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapatkan persetujuan bersama DPRD, untuk penyelenggaraan otonomi yang dimiliki oleh provinsi/kabupaten/kota, serta tugas pembantuan. Perda pada dasarnya merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Perda yang dibuat oleh satu daerah, tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan baru mempunyai kekuatan mengikat setelah diundangkan dengan dimuat dalam lembaran daerah.

Karena perda merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan, pembentukan suatu perda harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan pada umumnya, terdiri dari:

1. Kejelasan Tujuan
2. Kelembagaan atau organ pembentukan yang tepat
3. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan
4. Dapat dilaksanakan
5. Kedayagunaan dan keberhasilgunaan
6. Kejelasan rumusan
7. Keterbukaan.

Dari beberapa asas tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa perda yang baik itu adalah yang memuat ketentuan, antara lain:

1. Memihak kepada kepentingan rakyat banyak
2. Menjunjung tinggi hak asasi manusia
3. Berwawasan lingkungan dan budaya.

Pembentukan Peraturan Daerah yang baik harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Pertimbangan filosofis
2. Pertimbangan yuridis
3. Pertimbangan politis
4. Pertimbangan sosiologis
5. Pertimbangan ekologis
6. Pertimbangan ekonomis
7. Pertimbangan kultural
8. Pertimbangan religiositas

Agar Perda dapat berfungsi secara efektif, suatu Perda dapat memuat sanksi yang berupa:

1. Pembebanan biaya paksaan, penegakan hukum, seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan peraturan perundang-undangan
2. Pidana kurungan 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,-
3. Ancaman pidana atau denda selain dari yang telah disebutkan di atas sesuai dengan yang diatur dalam perundang-undangan lainnya.

Beberapa hal diatur dan akan mendapatkan sanksi apabila terbukti melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 4 Tahun 2008 tentang izin pengusahaan penangkaran sarang burung walet yaitu :

1. Pada pasal 6 disebutkan “Seluruh wilayah Kabupaten Siak terbuka untuk pengusahaan dan penangkaran sarang burung walet dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.”
2. Pada pasal 7 disebutkan bahwa “Setiap pengusahaan penangkaran sarang burung walet di habitat buatan berkewajiban mematuhi ketentuan Rencana Tata Ruang Kabupaten Siak, seperti peruntukan pelabuhan udara, perkantoran, kawasan industri serta kawasan pemukiman yang padat penduduknya, perdagangan, perekonomian dan kawasan pasar.”
3. Pasal 12 berbunyi “Setiap pengusahaan penangkaran sarang burung walet berkewajiban memiliki izin pengusahaan penangkaran sarang burung walet yang diterbitkan oleh Kepala Daerah.”

Dengan harapan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 4 tahun 2008 tentang izin pengusahaan penangkaran sarang burung walet bisa berjalan dengan efektif. Kemudian Pemerintah daerah memuat sanksi di dalam Perda tersebut, yaitu berupa disebutkan pada Bab XI pasal 26 ayat 1 yaitu setiap orang atau badan yang melanggar pasal 6, 7, 12, 19 dan pasal 24, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

2.6 Pandangan Islam

Islam adalah agama yang sangat sempurna ajarannya, tidak hanya membahas masalah aqidah saja namun lebih daripada itu yaitu tentang syariah yang di dalamnya terdapat ajaran tentang ibadah dan muamalah serta akhlak. Islam menjadi kompas bagi kehidupan umat manusia dalam menjalankan kehidupan disegala aspek kehidupan, seperti agama, ekonomi, sosial budaya, politik, pendidikan, kesehatan dan lainnya. Kelengkapan ajarannya telah mendorong manusia bergerak menuju pertumbuhan dan kebangunan intelektual dan kultural. Sumber ajarannya berasal dari Al-Quran dan Hadits.

Begitu juga dalam hal kebijakan pemerintah tidak akan pernah terlepas dari islam. Jauh sebelum ilmuwan barat mengutarakan teori-teori seputar kebijakan pemerintah ini. Al-Quran dan Hadits telah membicarakan hal itu, semua telah tertuang di dalamnya sekarang hanya tinggal bagaimana kita mau atau tidak mengikutinya.

Perhatian utama kepemimpinan adalah kebijaksanaan pemerintah, yaitu apa pun juga yang dipilih pemerintah, apakah mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu. Hal ini sangat penting untuk mengatasi keadaan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Karena masyarakat bukan hanya menilai apa yang dilaksanakan pemerintah saja tetapi juga apa yang tidak dilaksanakan pemerintah.

Kebijaksanaan itu merupakan pengambilan keputusan dan pengambilan kebijaksanaan, yaitu memilih dan menilai informasi yang ada untuk memecahkan masalah. Berikut komentar Al-Quran tentang kebijaksanaan pemerintah :

QS An-Nisaa' (4) Ayat 135, telah berfirman Allah SWT :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ
 أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا
 فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِمَا هُمْ لَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلَوْا
 أَوْ تَعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biar pun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya atau pun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan”.

Tafsir dari ayat diatas menurut M. Quraish Shihab adalah setelah mengemukakan nasihat dan peringatan di atas, dikemukakan juga dalam ayat ini hasil dari segala bimbingan sebelum ini terhadap semua umat beriman yaitu *wahai orang-orang yang beriman, jadilah penegak-penegak keadilan yang sempurna lagi sebenar-benarnya, menjadi saksi-saksi karena Allah*, yakni selalu merasakan kehadiran ilahi memperhitungkan segala langkah kamu dan menjadikannya demi karena Allah biarpun keadilan yang kamu tegakkan itu *terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu*. Hendaklah secara sempurna dan penuh perhatian kamu jadikan penegakan keadilan menjadi sifat yang melekat pada diri kamu dan kamu laksanakan dengan penuh ketelitian sehingga tercermin dalam seluruh aktivitas lahir dan batinmu. Jangan sampai ada sesuatu yang bersumber darimu mengeruhkan keadilan itu.

Dari ayat diatas kita dapat mengetahui bahwa islam menghendaki agar dalam pembuatan suatu kebijakan didasari oleh asas keadilan dan kebijakan yang dibuat tersebut haruslah memberikan kemaslahatan bagi orang banyak. Selain daripada itu kebijakan yang dihasilkan harus memiliki dasar yang jelas dan tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah.

2.7 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data (Sugiyono, 2007:70). Pada penelitian ini penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:

“Diduga Tidak Terlaksananya Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Izin Pengusahaan Penangkaran Sarang Burung Walet di Kecamatan Tualang”.

2.8 Definisi Konsep

Konsep-konsep yang telah dikemukakan di atas masih bersifat abstrak, maka agar tercapai kesatuan pengetahuan dan untuk memudahkan penelitian, maka dimasukkan beberapa batasan yang berpedoman pada teori yang dikemukakan pada telaah pustaka. Definisi konsep merupakan batasan dalam penelitian yang merupakan pokok batasan pada bagian berikutnya, dimaksudkan agar memberikan arah dalam penulisan bagian berikutnya, yaitu dengan mendefinisikan sebagai berikut :

1. Kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber-sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah publik atau pemerintah.
2. Implementasi itu merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan.
3. Implementasi Perda Nomor 4 Tahun 2008 adalah serangkaian tindakan yang diambil untuk terlaksananya Perda Nomor 4 Tahun 2008 tentang izin pengusahaan penangkaran sarang burung walet di Kabupaten Siak dalam berbagai hal : Perizinan, Pemanenan, Pengawasan dan Pengendalian, serta kewajiban dan sanksi.

4. Sarang burung walet adalah hasil burung walet yang sebagian besar berasal dari air liur yang berfungsi sebagai tempat untuk bersarang, bertelur, menetas dan membesarkan anak burung walet.
5. Sarang burung walet habitat buatan adalah sarang burung walet yang dikelola oleh pengusaha pada suatu bangunan dalam bentuk apapun juga yang sebagian atau seluruhnya diperuntukkan atau disediakan sebagai tempat untuk mengelola sarang burung walet dan berada diluar habitat alami.

2.9 Konsep Operasional

Konsep operasional adalah batasan atau rincian-rincian kegiatan operasional yang diperlukan untuk mengatur variabel penelitian yang dapat diukur dari gejala-gejala yang memberikan arti pada variabel tersebut. Untuk menghindari kesalahan dalam menafsirkan istilah yang digunakan serta memudahkan pemahamannya, maka dioperasionalkan beberapa konsep yang dipakai:

1. Perizinan penangkaran sarang burung walet adalah salah satu legalitas yang harus didapatkan oleh para pengusaha penangkaran sarang burung walet sudah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 4 Tahun 2008 yang mana dalam peraturan daerah tersebut menyatakan bahwa setiap perusahaan penangkaran sarang burung walet berkewajiban memiliki izin perusahaan penangkaran sarang burung walet yang diterbitkan oleh kepala daerah melalui Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP).

2. Pemanenan sarang burung walet adalah kegiatan pengambilan sarang burung walet dengan metoda atau cara yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip kelestarian. Sebagaimana yang telah diatur oleh Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 4 Tahun 2008.
3. Pengawasan dan Pengendalian adalah kegiatan pengamatan untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan teknis perusahaan penangkaran sarang burung walet dilakukan oleh Dinas Kehutanan. Kemudian Pengawasan dan pengendalian sarang burung walet terhadap dampak lingkungan dilakukan oleh Badan Pengendalian Dampak lingkungan Daerah (BAPEDALDA).
4. Kewajiban adalah berupa ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi oleh setiap pengusaha penangkaran sarang burung walet sebagaimana yang telah tercantum dalam Perda Nomor 4 Tahun 2008.

2.10 Variabel Penelitian

Variabel pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2007:38). Adapun variabel yang akan penulis analisis dalam penelitian ini langsung bersumberkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Siak No 4 Tahun 2008, antara lain :

1. Perizinan

- a. Persyaratan pengajuan permohonan.
- b. Pusat Kota Kecamatan Tualang yaitu kelurahan Perawang tidak termasuk daerah penangkaran walet.
- c. Lokasi penangkaran berjarak minimal dari pusat kota kecamatan 3 Km dan 500 m dari fasilitas umum dan fasilitas sosial.

2. Pemanenan

- a. Pemanenan sarang burung walet hanya dilakukan pada siang hari antara pukul 09.00 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
- b. Pemanenan dengan cara panen tetasan dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- c. Pemanenan dengan cara panen rampasan dapat dilakukan 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun.

3. Pengawasan dan Pengendalian.

- a. Pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan teknis perusahaan penangkaran sarang burung walet dilakukan oleh Dinas Kehutanan secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- b. Pengawasan dan pengendalian sarang burung walet terhadap dampak lingkungan dilakukan oleh Badan Pengendalian Dampak lingkungan Daerah (BAPEDALDA) secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- c. Melakukan sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 kepada pengusaha walet dan masyarakat.

4. Kewajiban

- a. Membuat dan menyampaikan laporan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada kepala daerah melalui kepala dinas kehutanan.
- b. Membuat dan menyampaikan laporan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali tentang pengelolaan lingkungan kepada kepala daerah melalui Bapedalda.
- c. Setiap pemanenan sarang burung walet wajib dicatat dan dilaporkan tertulis kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas Kehutanan.

2.11 Teknik Pengukuran

Berdasarkan variabel penelitian diatas, pengukuran dari masing-masing indikatornya adalah sebagai berikut :

1. Perizinan, adalah salah satu legalitas yang harus didapatkan oleh para pengusaha penangkaran sarang burung walet sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 4 Tahun 2008.

Dikategorikan :

Setuju : Apabila setiap pengusaha yang melakukan usaha penangkaran sarang burung walet mematuhi ketentuan yang terdapat di dalam Perda Nomor 4 Tahun 2008 terkait Perizinan.

Cukup Setuju : Apabila Dalam melakukan usaha penangkaran sarang burung walet cukup mematuhi ketentuan yang terdapat di dalam Perda Nomor 4 Tahun 2008 terkait Perizinan.

Tidak Setuju : Apabila Dalam melakukan usaha penangkaran sarang burung walet tidak mematuhi ketentuan yang terdapat di dalam Perda Nomor 4 Tahun 2008 terkait Perizinan.

2. Pemanenan, adalah kegiatan pengambilan sarang burung walet dengan metoda atau cara yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip kelestarian. Sebagaimana yang telah diatur oleh Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 4 Tahun 2008.

Setuju : Apabila dalam melakukan kegiatan pemanenan sarang burung walet sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana yang disebutkan dalam Perda Nomor 4 Tahun 2008.

Cukup Setuju : Apabila Dalam melakukan pemanenan sarang burung walet cukup mematuhi ketentuan yang terdapat di dalam Perda Nomor 4 Tahun 2008 terkait Pemanenan.

Tidak Setuju : Apabila Dalam melakukan pemanenan sarang burung walet tidak mematuhi ketentuan yang terdapat di dalam Perda Nomor 4 Tahun 2008 terkait Pemanenan.

3. Pengawasan dan Pengendalian, adalah kegiatan mengamati proses perusahaan yang dilakukan oleh pengusaha walet apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Setuju : Apabila sudah dilakukannya pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan perusahaan penangkaran sarang burung walet sebagaimana yang disebutkan dalam Perda Nomor 4 Tahun 2008.

Cukup Setuju : Apabila Dalam melakukan pengawasan dan pengendalian sarang burung walet cukup mematuhi ketentuan yang terdapat di dalam Perda Nomor 4 Tahun 2008.

Tidak Setuju : Apabila Dalam melakukan pengawasan dan pengendalian penangkaran sarang burung walet tidak mematuhi ketentuan yang terdapat di dalam Perda Nomor 4 Tahun 2008.

4. Kewajiban, adalah berupa ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi oleh setiap pengusaha penangkaran sarang burung walet sebagaimana yang telah tercantum dalam Perda Nomor 4 Tahun 2008.

Setuju : Apabila sudah melaksanakan kewajiban sebagaimana yang diatur dalam Perda Nomor 4 Tahun 2008.

Cukup Setuju : Apabila dalam melaksanakan kewajiban cukup mematuhi ketentuan yang berlaku sebagaimana telah diatur dalam Perda Nomor 4 Tahun 2008.

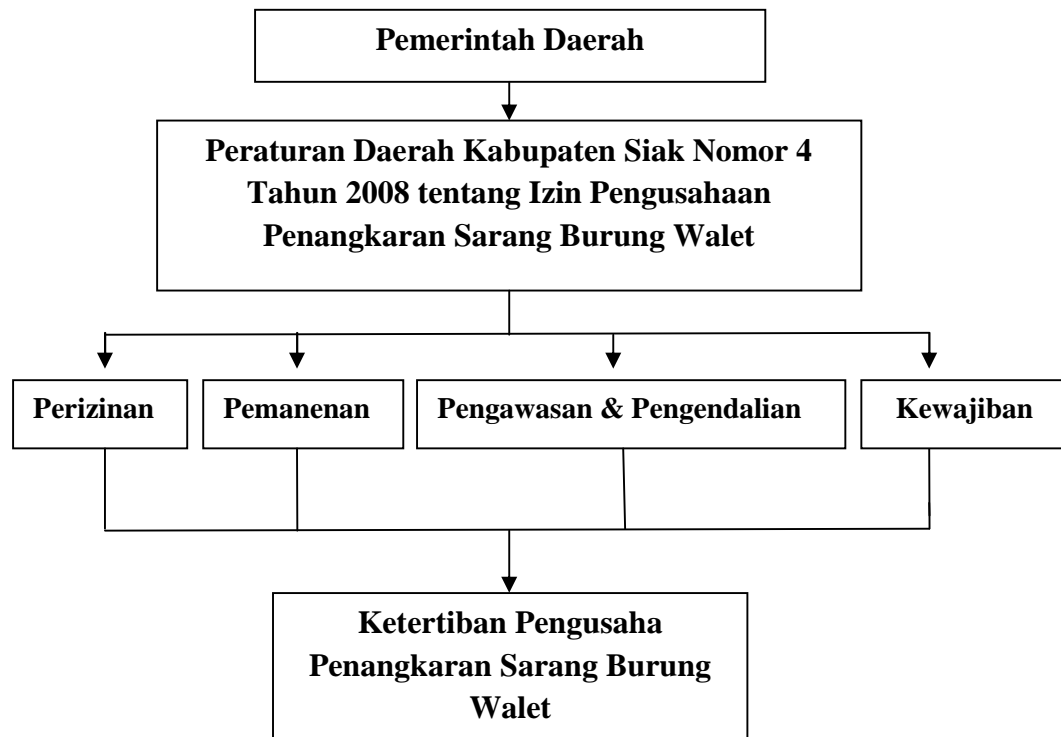
Tidak Setuju : Apabila dalam melaksanakan kewajiban cukup mematuhi ketentuan yang berlaku sebagaimana telah diatur dalam Perda Nomor 4 Tahun 2008.

2.12 Kerangka Berfikir

Uma Sekaran dalam Sugiyono (2007:65) mengemukakan bahwa kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.

Kerangka pikiran ini bertujuan untuk memberikan gambaran lebih jelas tentang variabel penelitian dan indikator-indikator yang menentukannya. Adapun kerangka pikiran dalam penelitian ini dapat dilihat dalam skema berikut :

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pemikiran Penelitian Mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 4 Tahun 2008 tentang Izin Pengusahaan Penangkaran Sarang Burung Walet di Kecamatan Tualang



Sumber: Modifikasi Penulis 2012

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan responden sebagai sumber informasi utama yang dibutuhkan untuk menganalisis keberadaan variabel penelitian. Data yang dikumpulkan dari responden penelitian dipergunakan sebagai acuan untuk menganalisis variabel penelitian pada objek atau lembaga yang diteliti. Bertitik tolak dari penjelasan diatas maka penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif.

Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi keadaan saat ini dan kaitannya dengan variabel-variabel yang ada dalam penelitian ini.

3.2 Waktu dan Tempat Penelitian

Adapun waktu pelaksanaan penelitian ini diadakan mulai dari bulan September tahun 2012 sampai dengan Januari tahun 2013. Sesuai dengan permasalahan yang terjadi, maka penelitian ini dilakukan di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang diperlukan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama, misalnya dari individu atau perseorangan, seperti hasil wawancara, pengisian kuesioner. Dalam pengertian lain data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden yang merupakan sumber informasi untuk memperoleh jawaban yang relevan mengenai permasalahan di dalam penelitian ini yakni tentang implementasi peraturan daerah Kabupaten Siak nomor 4 tahun 2008 tentang izin perusahaan penangkaran sarang burung walet di Kecamatan Tualang.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut, misalnya dalam bentuk tabel, grafik, diagram, gambar dan sebagainya, sehingga lebih informatif digunakan untuk digunakan pihak lain. Pada penelitian ini data sekunder yang penulis butuhkan diantaranya Berupa laporan, maupun informasi dari pihak instansi atau pihak yang berhubungan, seperti geografi Kecamatan Tualang, sejarah penangkaran sarang burung walet, daftar pengusaha walet.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan berbagai cara yang disesuaikan dengan informasi yang diinginkan, antara lain dilakukan dengan :

1. Wawancara (Interview),

Merupakan teknik pengumpulan data yang penulis gunakan untuk memperoleh informasi langsung dari pihak-pihak terkait. Wawancara itu

dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan, dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Pihak-pihak yang menjadi narasumber yaitu Dinas Kehutanan Kabupaten Siak, Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP), Bapedalda, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Siak, Tokoh Masyarakat, UPTD Dispenda Kecamatan Tualang, dan Kantor Kecamatan Tualang.

2. Pengamatan (Observation),

yaitu penulis melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat hasil implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 4 Tahun 2008 di Kecamatan Tualang. Pengamatan ini penulis lakukan untuk mencari kesesuaian antara data yang diperoleh dari objek penelitian dengan fakta yang terjadi di lapangan, yaitu tentang tata letak lokasi penangkaran Sarang Burung walet kemudian yang tidak memasang papan perizinan usaha serta pelanggaran-pelanggaran lainnya terhadap Perda Nomor 4 Tahun 2008.

3. Angket atau Quesioner

Yaitu aktivitas yang dilakukan untuk mendapatkan data dengan membuat serta menyebarkan daftar pertanyaan kepada responden untuk diisi sesuai dengan alternatif jawaban yang telah disediakan.

3.5 Populasi dan Sampel

3.5.1 Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah pengusaha penangkaran sarang burung walet 17 orang dan *key informan* atau informasi kunci sebanyak 7 orang.

3.5.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah data dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. (Sugiyono, 2007). Untuk teknik pengambilan sampel dari pengusaha walet adalah dengan menggunakan teknik *sensus*, yaitu keseluruhan populasi dari pengusaha penangkaran sarang burung walet diambil semuanya sebagai sampel.

Sedangkan teknik pengambilan sampel dari *Key Informan* adalah dengan menggunakan teknik *Purposive Sampling* yakni diambil berdasarkan prioritas dan pertimbangan-pertimbangan tertentu. *Key Informan* yang dijadikan sampel adalah 7 orang yang terdiri dari Dinas Kehutanan Kabupaten Siak, Kantor Pelayanan Terpadu Satu pintu (KPTSP), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Siak (DPRD), Kantor Kecamatan Tualang, Bapedalda Kabupaten Siak, Tokoh Masyarakat, dan UPTD Dinas Pendapatan Kecamatan Tualang.

Untuk lebih jelasnya, penetapan jumlah populasi dan sampel dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.1 Penetapan populasi dan sampel penelitian

No	Sub Populasi	Populasi	Sampel
1	Pengusaha Penangkaran Sarang Burung Walet Kecamatan Tualang Kabupaten Siak	17	17
2	Key Informan atau Informasi Kunci	7	7
Jumlah		24	24

Sumber : Data olahan tahun 2012

3.6 Analisa Data

Dalam menganalisis, peneliti akan mendeskripsikan atau menggambarkan secara utuh dan nyata mengenai Implementasi Peraturan daerah Kabupaten Siak Nomor 4 Tahun 2008 tentang izin pengusahaan penangkaran sarang burung walet di Kecamatan Tualang, kemudian data dituangkan kedalam bentuk Tabel-tabel dengan angka dan prosentase untuk selanjutnya dianalisa dengan deskriptif analisa.

Adapun menurut Arikunto (2006:79). Dalam menganalisa data penelitian penulis menggunakan analisa deskriptif kualitatif atau disebut juga analisis isi (*Content analysis*).

Analisa deskriptif ini diawali dengan pengumpulan data dengan menggunakan instrument penelitian, setelah data terkumpul dilakukan pengkodean, selanjutnya penyajian data dengan mengklasifikasinya, kemudian proses analisa serta diakhiri dengan penarikan kesimpulan.

Adapun persentase dengan rumus sebagai berikut:

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Dimana:

P = Persentase

F = Frekuensi

N = Total Jumlah

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Sejarah Kabupaten Siak

Kabupaten Siak merupakan kabupaten baru hasil pemekaran dari Kabupaten Bengkalis berdasarkan Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999, tepatnya pada tanggal 04 Oktober 1999 dengan ibukota adalah Siak Sri Indrapura. Wilayah Kabupaten Siak sebagai bagian dari Provinsi Riau secara geografis terletak pada daratan pulau sumatera bagian timur, dengan luas wilayah lebih kurang 8.556,09 Km². Wilayah Kabupaten Siak memiliki batas-batas diantaranya:

- Sebelah utara : Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis
- Sebelah timur : Kecamatan Tebing Tinggi dan Kecamatan Merbau
- Sebelah Selatan : Kecamatan Bunut dan Kecamatan Kuala Kampar
- Sebelah Barat : Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis

Secara administratif dahulunya Kabupaten Siak hanya memiliki 3 kecamatan yaitu Kecamatan Siak, Kecamatan Sungai Apit, dan Kecamatan Minas. Namun pada sekarang ini sudah terdapat 14 kecamatan di wilayah Kabupaten Siak, yang terdiri dari Kecamatan Siak, Sungai Apit, Minas, Tualang, Sungai Mandau, Dayun, Kerinci Kanan, Bungaraya, Koto Gasib, Kandis, Lubuk Dalam, Sabak Auh, Mempura, dan Pusako.

4.2 Gambaran Umum Kecamatan Tualang

Terbentuknya Kecamatan Tualang sebagai institusi yang berperan menjalankan roda pemerintahan dan pemberdayaan serta pembangunan masyarakat merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah otonomi Kabupaten Siak, merupakan aspirasi masyarakat yang bermanfaat untuk mempermudah penduduk dalam hal pelaksanaan kepengurusan administrasi serta lebih mendekatkan antara pemerintah dengan rakyatnya.

Kecamatan Tualang merupakan salah satu kecamatan yang termasuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Siak. Kecamatan Tualang merupakan hasil pemekaran dari Kecamatan Siak berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 13 Tahun 2001 yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Siak dengan ibukota Perawang. Sebelumnya merupakan kecamatan pembantu yang menginduk ke kecamatan Siak sebelum terbentuknya Kabupaten Siak. Kecamatan Tualang berjarak kurang lebih 75 Km² dengan waktu tempuh 1 jam 12 menit dari pusat pemerintahan kabupaten, 60 Km² dari ibukota provinsi dengan waktu tempuh 1 jam 10 menit, yang mana dapat ditempuh melalui jalur darat maupun sungai.

1. Kondisi wilayah

Wilayah Kecamatan Tualang seperti pada umumnya wilayah Kabupaten Siak terdiri dari daratan rendah, bergelombang, dan sedikit berbukit dengan struktur tanah terdiri dari tanah padsolid merah kuning dari batuan dan alluvial serta tanah orgonosol dan gleyhumus dalam bentuk rawa-rawa tanah basah. Kecamatan Tualang secara umum berada pada daerah dataran dan sedikit

berbukit, dengan mayoritas sektor pertanian yang didominasi oleh perkebunan kelapa sawit.

2. Luas Wilayah

Luas wilayah Kecamatan Tualang terletak antara $0^{\circ}32^1 - 0^{\circ}51^1$ lintang utara $101^{\circ}28^1 - 101^{\circ}52^1$ bujur timur dengan luas keseluruhan Kecamatan Tualang yaitu 373,75 KM². Dimana terdiri dari 8 Desa/Kelurahan yaitu Kelurahan Perawang seluas 20 Ha, Tualang seluas 43,16 Ha, Pinang Sebatang dengan luas 40,88 Ha, Maredan dengan luas 145,25 Ha, Pinang Sebatang Timur dengan luas 38,16 Ha, Pinang Sebatang Barat dengan luas wilayah 21,46 Ha, Maredan Barat dengan luas wilayah 28,98 Ha, dan Perawang Barat dengan luas wilayah 45,18 Ha. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.1 Daftar Luas wilayah Desa/Kelurahan di wilayah Kecamatan Tualang tahun 2011

No	Desa/Kelurahan	Luas Wilayah (Ha)
1	Kelurahan Perawang	20
2	Tualang	43,16
3	Pinang Sebatang	40,88
4	Maredan	145,25
5	Pinang sebatang timur	38,16
6	Pinang sebatang Barat	21,46
7	Maredan Barat	28,98
8	Perawang Barat	45,18
Jumlah		373,75

Sumber : Kantor Kecamatan Tualang

3. Batas-batas Wilayah

Wilayah Kecamatan Tualang berdasarkan Peraturan daerah Kabupaten Siak Nomor 13 Tahun 2001 masing-masing berbatasan dengan :

- Sebelah Barat : Kecamatan Minas, Kota Pekanbaru
- Sebelah Timur: Kecamatan Sungai Mandau, Kecamatan Koto Gasib
- Sebelah Utara : Kecamatan Minas, Kecamatan Mandau
- Sebelah Selatan : Kecamatan Kerinci Kanan, Kota Pekanbaru

4. Keadaan Penduduk

Penduduk merupakan sumber daya manusia yang terdapat dalam suatu wilayah dan sangat menentukan kelancaran dan keberhasilan pembangunan. Penduduk di Kecamatan Tualang selalu mengalami perkembangan yang pesat setiap tahunnya, seiring dengan meningkatnya taraf ekonomi masyarakat yang memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan penduduk.

Dari hasil registrasi penduduk di Kecamatan Tualang sebanyak 105.553 jiwa dengan jumlah laki-laki 55.232 jiwa dan perempuan sebanyak 50.321 jiwa. Sedangkan jumlah keluarga sebanyak 25.231 sehingga diperoleh penduduk per rumah tangga adalah 4.18.

Untuk wilayah Desa Tualang terdiri atas 18.669 jiwa atau sekitar 17,69 %, Kelurahan Perawang 42.426 jiwa atau sekitar 40,19 %, Perawang Barat 22.351 jiwa atau sekitar 21,18 %, Maredan 3.110 jiwa atau sekitar 2,95 %, Maredan Barat 2.325 jiwa atau sekitar 2,20 %, Pinang Sebatang 3.898 jiwa atau sekitar 3,69 %, Pinang Sebatang Barat 4.919 jiwa atau sekitar 4,66 %, Pinang Sebatang Timur

7.855 jiwa atau sekitar 7,44 %. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Kecamatan Tualang berdasarkan Desa/Kelurahan yang ada Tahun 2011

No	Desa/Kelurahan	Jumlah penduduk	Persentase (%)
1	Tualang	18.669	17,69
2	Perawang	42.426	40,19
3	Perawang Barat	22.351	21,18
4	Maredan	3.110	2,95
5	Maredan Barat	2.325	2,20
6	Pinang Sebatang	3.898	3,69
7	Pinang Sebatang Barat	4.919	4,66
8	Pinang Sebatang Timur	7.855	7,44
Jumlah		105.553	100,00

Sumber : Kantor Kecamatan Tualang

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan membahas hasil penelitian mengenai implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 4 Tahun 2008 tentang izin pengusahaan penangkaran sarang burung walet di Kecamatan Tualang, dengan menggunakan 4 indikator penelitian terdiri atas Perizinan, Pemanenan, Pengawasan dan Pengendalian dan Kewajiban. Namun sebelum masuk kepada bab pembahasan hasil penelitian penulis akan menyajikan identitas responden pada penelitian. Dapat dilihat dari aspek jenis kelamin, tingkat usia responden dan tingkat pendidikan responden.

5.1 Identitas Responden

Sebelum penulis membahas dan menganalisa lebih lanjut tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 4 Tahun 2008 tentang Izin Pengusahaan Penangkaran Sarang Burung Walet di Kecamatan Tualang maka terlebih dahulu penulis memaparkan identitas responden yang diidentifikasi, adalah sebagai berikut :

5.1.1 Responden Menurut Jenis Kelamin

Untuk mengetahui lebih jelas mengenai identitas responden berikut ini penulis akan menguraikan mengenai identitas responden menurut jenis kelamin, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 5.1
Responden menurut Jenis kelamin

No	Jenis Kelamin	Frekuensi (orang)	Persentase (%)
1	Laki-laki	14	82.35 %
2	Perempuan	3	17.65 %
Jumlah		17	100 %

Sumber : Data Olahan 2012

Dari tabel 5.1 diatas dapat diketahui bahwa jumlah sampel untuk responden sebanyak 17 orang, yang keseluruhannya terdiri dari 14 responden laki-laki atau 82.35 %, sedangkan responden perempuan sebanyak 3 responden atau 17.65 %. Jadi jumlah keseluruhan responden yang dijadikan sampel adalah 17 orang.

5.1.2 Responden Menurut Tingkat Usia

Secara teoritis faktor usia akan mempengaruhi seseorang dalam mengambil sebuah keputusan. Demikian pula dalam menentukan pilihan, usia akan memberikan pengaruh, semakin tinggi tingkat usia semakin baik karena tingkat kematangan emosi seseorang dalam berfikir. Selanjutnya tingkat usia juga akan mempengaruhi seseorang melakukan setiap aktifitas dalam kehidupannya. Karena itu tingkat usia selalu dijadikan indikator dalam menentukan produktif atau tidaknya seseorang. Faktor usia juga mempengaruhi pola pikir dan standar kemampuan fisik dalam suatu pekerjaan. Dari penelitian dapat dikatakan bahwa sebagian responden dalam penelitian ini tergolong usia produktif dan dewasa atau matang dalam berfikir, sehingga diharapkan mampu memberikan data-data dan informasi sesuai dengan yang dibutuhkan. Tingkat usia responden dapat dilihat dalam tabel 5.2 di bawah ini :

Tabel 5.2
Identitas responden berdasarkan tingkat usia

No	Tingkat Usia	Jumlah Orang	Persentase (%)
1	26 – 30	4	23.53 %
2	31 – 35	3	17.65 %
3	36 – 40	3	17.65 %
4	41 – 45	5	29.41 %
5	46 – 50	2	11.76 %
Jumlah		17	100 %

Sumber : Data Olahan 2012

Dari tabel 5.2 di atas dapat dilihat bahwa responden yang terbanyak adalah berumur 41-45 tahun sebanyak 5 orang, sedangkan yang paling sedikit yaitu antara umur 46-50 tahun sebanyak 2 orang. Jadi dapat dikatakan bahwa responden dalam penelitian ini adalah mereka yang berusia 41 tahun ke atas, dan dapat diasumsikan tidak ada masalah dalam kualitas dan produktivitas kerja.

5.1.3 Responden menurut tingkat pendidikan

Sebagai dasar pertimbangan untuk mempedomani segala sesuatu yang menyangkut dengan keterangan, tanggapan, dan jawaban-jawaban yang diberikan responden pada masalah variabel penelitian maka penulis terlebih dahulu melihat dari segi latar belakang tingkat pendidikan responden. Pendidikan akan memberikan pengaruh terhadap jawaban yang akan diberikan oleh responden, karena pola pikirnya tentu akan berbeda antara satu orang dengan lainnya. Dapat dilihat pada tabel 5.3 di bawah ini :

Tabel 5.3
Responden menurut tingkat pendidikan

No	Responden	Jumlah Orang	Persentase (%)
1	Strata 1	5	29.41 %
2	Diploma 3	2	11.76 %
3	Sekolah Menengah Atas	10	58.83 %
Jumlah		17	100 %

Sumber : Data Olahan 2012

Dari tabel 5.3 di atas, dapat dilihat bahwa responden yang terbanyak adalah tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 10 orang sedangkan yang paling sedikit yaitu tingkat Akademi/Diploma sebanyak 2 orang responden, maka dapat diakumulasikan bahwa tingkat pendidikan SLTA lebih dominan, artinya diharapkan mampu mengetahui dan menyadari pentingnya untuk menjalankan Peraturan daerah Kabupaten Siak Nomor 4 Tahun 2008 tentang Izin Pengusahaan Penangkaran Sarang Burung Walet di Kecamatan Tualang.

5.2 Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 4 Tahun 2008 tentang Izin Pengusahaan Penangkaran Sarang Burung Walet di Kecamatan Tualang.

Mengingat sarang burung walet merupakan salah satu satwa liar yang dapat dimanfaatkan secara lestari untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap menjamin keberadaan populasinya di alam dan sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 100/KPTS-II/2003 tentang pedoman Pemanfaatan Sarang Burung Walet. Bahwa untuk mencapai keselarasan dalam pengawasan, pelestarian satwa guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dipandang perlu diatur pengusahaan penangkaran sarang burung walet tersebut,

dimana sarang burung walet merupakan potensi alam yang dimanfaatkan oleh manusia sebagai suatu bahan makanan yang bermanfaat bagi kesehatan yang sejak lama diusahakan oleh masyarakat.

Kehadiran Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 4 Tahun 2008 tentang Izin pengusahaan penangkaran sarang burung walet ditetapkan untuk mengatur pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet, sekaligus demi mencapai keselarasan lingkungan, pelestarian satwa serta guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Siak.

Setiap pengusaha yang akan melakukan kegiatan pengusahaan penangkaran sarang burung walet baik di habitat alami atau habitat buatan setelah diterbitkannya Peraturan daerah ini wajib mendapatkan izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan memperhatikan tata ruang Kabupaten Siak. Dalam pengurusan izin pengusahaan penangkaran sarang burung walet, Pemerintah Daerah Kabupaten Siak memberikan wewenang kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Siak dan Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP) untuk mengurus dan memproses permohonan izin yang diajukan oleh pengusaha.

Kecamatan Tualang adalah salah satu tempat pengusahaan penangkaran sarang burung walet yang ada di Kabupaten Siak, dalam pelaksanaan pengusahaan penangkaran sarang burung walet ini memiliki banyak permasalahan. Artinya ada tindakan-tindakan diambil oleh pengusaha yang tidak berkenaan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 4 tahun 2008 tentang izin pengusahaan penangkaran sarang burung walet. Permasalahan itu adalah

masih banyak pengusaha walet yang belum memiliki izin, melanggar tentang kriteria lokasi dan lokasi prioritas untuk penangkaran walet.

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 4 Tahun 2008 tentang Izin Pengusahaan Penangkaran Sarang Burung Walet di Kecamatan Tualang ini dimaksudkan untuk melihat sampai sejauhmana Peraturan Daerah tersebut dapat mengatur usaha penangkaran sarang burung walet di Kecamatan Tualang. Sebagai indikator dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 4 tahun 2008 ini adalah tentang Perizinan, Pemanenan, Pengawasan dan Pengendalian, serta Kewajiban.

Gambaran dari hasil penelitian tersebut dapat dilihat dari uraian data hasil penelitian berikut ini :

5.2.1 Perizinan

Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 4 Tahun 2008 telah mengatur tentang tata cara pemberian izin penangkaran sarang burung walet yaitu dalam Pasal 12 Perda Nomor 4 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa setiap pengusaha penangkaran sarang burung walet berkewajiban memiliki izin pengusaha penangkaran sarang burung walet yang diterbitkan oleh Kepala Daerah.

5.2.1.1 Persyaratan Pengajuan permohonan

Dalam Pasal 13 ayat 2 disebutkan bahwa untuk mendapatkan izin penangkaran tersebut, pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas Kehutanan dengan melampirkan :

1. Surat permohonan;
2. Advices planing dari Bappeda;
3. Pertimbangan teknis dari Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA);

4. Izin Mendirikan Bangunan;
5. Izin Gangguan (HO);
6. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
7. Akte Pendirian Perusahaan bagi badan usaha;
8. Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
9. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
10. Pertimbangan teknis dari Dinas Kehutanan Kabupaten Siak;
11. Rekomendasi dari asosiasi Pengusaha burung walet yang telah disahkan oleh Pemerintah Daerah.

Dalam urusan pengurusan izin penangkaran sarang burung walet, Pemerintah Daerah Kabupaten Siak memberikan wewenang kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Siak dan Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP) untuk mengurus dan memproses permohonan izin yang diajukan oleh pengusaha. Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP) merupakan dinas yang diberikan wewenang dalam segala urusan perizinan penangkaran walet. Sedangkan Dinas Kehutanan dan Perkebunan berwenang untuk memeriksa pertimbangan teknis lokasi penangkaran. Pertimbangan teknis tersebut berupa pertimbangan tentang lokasi penangkaran yang dilakukan oleh pengusaha yaitu penangkaran yang tidak melanggar Aturan Tata Ruang Daerah Kabupaten Siak.

Untuk mengetahui tanggapan responden mengenai apakah dalam melakukan usaha penangkaran sarang burung walet para pengusaha telah mengurus izin sebagaimana telah diatur dalam Peraturan daerah Kabupaten Siak Nomor 4 Tahun 2008. Dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.4
Tanggapan responden mengenai sudah mengurus dan memiliki perizinan
usaha penangkaran sarang burung walet.

No	Kategori	Jumlah	Persentase (%)
1	Setuju	-	-
2	Cukup Setuju	-	-
3	Tidak Setuju	17	100 %
Jumlah		17	100 %

Sumber : Data Olahan 2012

Dari tabel 5.4 di atas tanggapan responden mengenai perizinan usaha penangkaran sarang burung walet, dimana yang menjawab tidak setuju sebanyak 17 orang dengan persentase 100 %. Dengan demikian keseluruhan responden berpendapat belum mengurus dan memiliki perizinan penangkaran sarang burung walet yang ada di Kecamatan Tualang.

Penulis melakukan pengamatan ditempat penelitian, bahwasanya pengusaha walet yang ada di Kecamatan Tualang memang belum Mengurus untuk perizinan usaha penangkaran walet ini. Dikarenakan belum bisa melengkapi persyaratan yang diinginkan oleh pemerintah sebagaimana yang tertuang dalam Perda Nomor 4 Tahun 2008, sampai hari ini para pengusaha walet belum ada satupun yang memiliki izin usaha penangkaran sarang burung walet.

Untuk mencari kebenaran informasi mengenai hal tersebut penulis melakukan penelitian langsung ke lapangan terhadap pihak-pihak yang terkait dalam urusan perizinan penangkaran sarang burung walet, diantaranya adalah : Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP) Kabupaten Siak dan Dinas Kehutanan.

1. Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP)

Untuk mempermudah pengurusan perizinan penangkaran sarang burung walet, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Siak memindahkan pengurusan izin penangkaran sarang burung walet dari Dinas Kehutanan kepada Kantor Pelayanan Terpadu satu Pintu (KPTSP).

Dalam penelitian ini penulis langsung melakukan wawancara kepada Bapak Harpizon, SE, MM untuk mendapatkan informasi tentang perizinan penangkaran sarang burung walet. Dapat dilihat pada kutipan langsung wawancara penulis dengan Bapak Harpizon pada Tanggal 14 Desember 2012 :

“Sampai hari ini pengusaha penangkaran walet belum satupun yang memiliki izin perusahaan walet, mereka ada yang datang untuk meminta formulir perizinan namun setelah itu tidak ada lagi kembali. Hal ini dikarenakan belum bisa melengkapi persyaratan permohonan. Dimana setiap surat permohonan yang masuk harus mendapatkan pertimbangan teknis lokasi penangkarannya dari Dinas Kehutanan, jika semuanya sudah beres maka kami akan mendapatkan surat rekomendasi dari Dinas Kehutanan untuk mengeluarkan surat izin, namun sampai saat ini kami belum menerima surat rekomendasi tersebut.”

Berdasarkan hal tersebut dapat kita ketahui bahwa pengusaha walet dalam melakukan usaha penangkaran sarang burung walet belum memiliki legalitas. Kemudian Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP) berwenang hanya mengeluarkan surat izin saja dan sifatnya hanya menunggu adanya rekomendasi dari Dinas Kehutanan.

2. Dinas Kehutanan Kabupaten Siak

Dalam urusan perizinan sarang burung walet, Dinas Kehutanan merupakan instansi yang diberikan wewenang untuk memeriksa pertimbangan teknis lokasi penangkaran. Pertimbangan teknis tersebut berupa pertimbangan tentang lokasi penangkaran yang dilakukan oleh pengusaha yaitu penangkaran yang tidak melanggar Aturan Tata Ruang Daerah Kabupaten Siak. Apabila semuanya sudah lengkap dan penangkaran yang dilakukan oleh pengusaha walet tidak bertentangan dengan ketentuan Tata Ruang Daerah, maka Dinas Kehutanan akan memberikan rekomendasi kepada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP) untuk menerbitkan surat izin penangkaran.

Dalam penelitian di Dinas Kehutanan ini penulis ingin mengetahui mengapa sampai saat ini Dinas Kehutanan belum memberikan rekomendasi kepada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP) untuk menerbitkan surat izin penangkaran yang diajukan oleh pengusaha walet. Berikut ini adalah kutipan dari hasil wawancara kepada Sekretaris Dinas Kehutanan Kabupaten Siak, yaitu Bapak Supriyanta :

“Permohonan izin memang sudah ada, namun kami belum bisa memberikan rekomendasi kepada KPTSP untuk menerbitkan izin tersebut, karena izin lokasinya, ada aturannya, yaitu radius sekian kilo dari pemukiman , dan lokasi yang diprioritaskan. Namun penangkaran walet yang dilakukan oleh pengusaha walet sekarang ini telah melanggar ketentuan Tata Ruang daerah.” Padahal dalam Perda telah diatur. Untuk pembahasan tersebut nantinya dari Dinas Tata Ruang, PU dan juga kami di Kadishut”.

Terlihat jelas bahwa Pemerintah Kabupaten Siak terkesan lamban dalam menyelesaikan permasalahan perizinan penangkaran walet tersebut. Padahal Perda Nomor 4 Tahun 2008 sudah empat tahun disahkan. Seharusnya jika memang pengusaha walet melakukan pelanggaran terhadap Perda Nomor 4 Tahun 2008 yaitu tentang lokasi penangkaran, maka permohonan izin penangkaran tersebut tidak perlu diproses hingga memakan waktu yang sangat lama. Tindakan yang perlu diambil adalah dengan mengeluarkan surat penolakan permohonan sebagaimana disebutkan dalam Perda tepatnya pada pasal 13 ayat 3 yaitu “Dalam hal permohonan tidak memenuhi persyaratan teknis, maka Kepala Daerah wajib menerbitkan surat penolakan permohonan.” Dan langkah selanjutnya yang perlu diambil adalah dengan menertibkan penangkaran-penangkaran yang tidak sesuai dengan Perda. Namun hingga hari ini dapat kita lihat belum ada kesungguhan dari Dinas Kehutanan untuk melakukan penertiban terhadap penangkaran tersebut. Hal ini terkesan pemerintah membiarkan saja pengusaha walet tersebut untuk tetap melakukan usaha. Hal ini memberikan kesempatan besar bagi pengusaha untuk tidak melakukan relokasi usahanya. Sehingga pengusaha-pengusaha tersebut menikmati hasil penangkaran sarang burung walet dan tanpa mengeluarkan biaya retribusi perizinan dan tidak bisa dikenakan pajak pendapatan. Kondisi seperti ini sangat disayangkan sekali mengingat Perda Nomor 4 Tahun 2008 sudah berjalan selama empat tahun. Tentunya merugikan masyarakat dan Pemerintah Daerah itu sendiri.

Dinas Kehutanan seharusnya tegas terhadap permasalahan tersebut dengan melakukan relokasi secepatnya dari awal-awal kemarin terhadap usaha penangkaran walet yang sudah menjamur di pemukiman masyarakat tersebut, sehingga Perda Nomor 4 Tahun 2008 tentang izin pengusahaan penangkaran sarang burung walet bisa terlaksana. Kemudian surat izin bisa dikeluarkan untuk pengusaha dan PAD Kabupaten Siak akan bertambah dari hasil retribusi perizinan dan pajak pendapatannya.

Pihak pemerintah harus dapat menyusun suatu kebijakan yang tepat dan dapat diimplementasikan secara maksimal dalam kondisi nyata. Karena bagaimanapun baiknya suatu kebijakan, tidak akan memberikan manfaat yang optimal bagi pemerintah maupun masyarakat apabila kebijakan tersebut tidak dapat diterapkan.

Kegagalan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 4 Tahun 2008 terutama yang mengatur tentang perizinan penangkaran sarang burung walet disebabkan oleh penangkaran sarang burung walet yang dibangun oleh pengusaha walet tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Misalnya seperti kriteria lokasi telah disebutkan bahwa (1) jarak minimal dari pusat kota kecamatan 3 Km dan 500 M dari fasilitas umum dan fasilitas sosial, (2) kepadatan penduduk rendah sampai sedang dan, (3) lahan terlantar dan/atau bukan lahan produktif. Kemudian untuk Kecamatan Tualang lokasi yang diprioritaskan berada di Desa Pinang Sebatang Barat, Desa Pinang Sebatang Timur dan Desa Tualang. Tidak satu orang pengusaha pun yang sesuai dengan ketentuan ini. Perda sudah

berjalan kurang lebih selama empat tahun, namun hingga saat ini kehadiran Perda belum bisa memberikan manfaat yang optimal. Seharusnya Pemerintah Daerah dengan payung hukum yang kuat yaitu Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 segera mengambil tindakan terhadap penangkaran-penangkaran yang secara nyata sudah melanggar peraturan tersebut. Dengan cara memberikan sanksi terhadap pengusaha sebagaimana yang telah diatur dalam Perda Nomor 4 Tahun 2008 yaitu pada pasal 26 ayat 1 berbunyi setiap orang atau badan yang melanggar pasal 6, 7, 12, 19, dan pasal 24, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta). Namun hingga saat ini belum ada kesungguhan dari Pemerintah daerah untuk menindak lanjuti permasalahan ini. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya pengusaha-pengusaha walet di Kecamatan Tualang yang dikenakan sanksi karena telah melakukan pelanggaran berupa pelanggaran terhadap pasal 7 tentang lokasi penangkaran dan pasal 12 tentang perizinan penangkaran walet.

Untuk memperoleh informasi yang lebih jelas mengenai hal tersebut maka penulis mengutip hasil wawancara langsung dengan salah seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Siak berasal dari Kecamatan Tualang yaitu dengan Bapak Juprizal. Berikut ini adalah kutipan dari hasil wawancara kepada Bapak Juprizal :

“Pengusaha walet sampai saat ini memang belum ada yang punya izin penangkaran walet, izin tidak bisa dikeluarkan oleh Pemda karena pengusaha walet tidak memenuhi persyaratan teknis. Sanksi belum bisa diberikan kepada pengusaha yang melanggar ketentuan dalam Perda, sampai saat ini kami belum bisa mengambil tindakan terhadap perusahaan penangkaran sarang burung walet yang belum punya izin, kemudian berlokasi di pemukiman masyarakat, ataupun yang tidak sesuai dengan lokasi prioritas, karena dasar hukum yang digunakan dalam Perda walet ini masih memakai RTRW yang lama, belum sama sekali mengatur tentang penangkaran walet. Jika kita tetap melakukannya tentu akan menuai protes dari kalangan pengusaha walet pada akhirnya kami juga yang dipersalahkan”.

Seharusnya jika fakta dilapangan seperti ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Siak bersama dengan instansi-instansi terkait harus segera berkoordinasi dari awal-awal kemarin untuk merevisi terhadap Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2008 tersebut, sehingga izin penangkaran bisa dikeluarkan dan PAD Kabupaten Siak bertambah dari penerimaan retribusi perizinan penangkaran sarang burung walet. Sangat disayangkan sekali karena Peraturan daerah ini sudah berjalan selama empat tahun dan kondisi ini hanya dibiarkan saja oleh Pemerintah Daerah. Bila Pemerintah Daerah menyadari betul tentang perlunya komitmen dalam bekerja, sudah barang tentu kondisi ini tidak dibiarkan berlalu begitu saja dan kehadiran Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2008 tentu akan memberikan banyak manfaat tidak hanya untuk Pemerintah Daerah saja namun masyarakat juga.

5.2.1.2 Pusat kota Kecamatan Tualang yaitu Kelurahan Perawang dan daerah padat pemukiman tidak termasuk daerah penangkaran walet

Kota Kecamatan Tualang dan daerah padat pemukiman tidak termasuk daerah penangkaran walet, sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2010 menyebutkan bahwa pusat kota kecamatan dan daerah padat pemukiman tidak termasuk lokasi prioritas penangkaran walet.

Untuk mengetahui tanggapan responden mengenai apakah lokasi penangkaran sarang burung walet di Kecamatan Tualang sudah sesuai dengan lokasi prioritas maka dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5.5
Tanggapan responden mengenai lokasi penangkaran sarang burung walet di Kecamatan Tualang sudah sesuai dengan lokasi prioritas.

No	Kategori	Jumlah	Persentase (%)
1	Setuju	2	11.76 %
2	Cukup Setuju	4	23.53 %
3	Tidak Setuju	11	64.71 %
Jumlah		17	100 %

Sumber : Data Olahan 2012

Dari tabel di atas tanggapan responden mengenai lokasi penangkaran sarang burung walet di Kecamatan Tualang sudah sesuai dengan lokasi prioritas, dimana yang menjawab setuju sebanyak 2 orang dengan persentase 11.76 %, cukup setuju 4 orang dengan persentase 23.53 %, dan menjawab tidak setuju sebanyak 11 orang dengan persentase 64.71 %. Dengan demikian sebagian besar responden berpendapat bahwa lokasi perusahaan penangkaran sarang burung

walet milik pengusaha walet tidak sesuai dengan lokasi yang diprioritaskan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2010 tentang pedoman pelaksanaan Peraturan daerah Kabupaten Siak Nomor 4 Tahun 2008.

Ada beberapa responden yang menuliskan alasannya dilembaran kuesioner mengenai apakah lokasi penangkaran sarang burung walet di Kecamatan Tualang sudah sesuai dengan lokasi yang diprioritaskan dapat dilihat sebagai berikut :

1. Kami tidak tahu menahu tentang adanya lokasi yang diprioritaskan bagi setiap pengusaha yang ingin melakukan usaha penangkaran sarang burung walet.
2. Bangunan yang kini kami jadikan untuk tempat pengusahaan penangkaran sarang burung walet sudah lama sekali dibangun sebelum munculnya Perda terkait pengusahaan penangkaran walet ini.
3. Lokasi yang kami jadikan untuk penangkaran sarang burung walet ini sangat strategis tempatnya. Karena ada banyak sekali burung walet yang hidup disekitar daerah tersebut.

5.2.1.3 Lokasi penangkaran berjarak minimal dari pusat kota kecamatan 3 Km dan 500 M dari fasilitas umum dan fasilitas sosial

Penangkaran sarang burung walet harus berjarak minimal dari pusat kota kecamatan 3 Km dan 500 M dari fasilitas umum dan fasilitas sosial. Dengan tujuan supaya menghindarkan masyarakat banyak sejauh mungkin dari dampak negatif akibat pencemaran, polusi, kotoran dan hama penyakit. Peraturan ini

tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2010 tentang pedoman pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 4 Tahun 2008.

Untuk mengetahui tanggapan responden mengenai apakah tempat pengusahaan penangkaran sarang burung walet berjarak minimal dari pusat kota kecamatan 3 Km dan 500 M dari fasilitas umum dan fasilitas sosial dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5.6
Tanggapan responden mengenai tempat pengusahaan penangkaran sarang burung walet berjarak minimal dari pusat kota kecamatan 3 Km dan 500 M dari fasilitas sosial dan fasilitas umum.

No	Kategori	Jumlah	Persentase (%)
1	Setuju	2	11.76 %
2	Cukup Setuju	5	29.41 %
3	Tidak Setuju	10	58.83 %
Jumlah		17	100 %

Sumber : Data Olahan 2012

Dari tabel 5.6 di atas tanggapan responden mengenai tempat pengusahaan penangkaran sarang burung walet berjarak minimal dari pusat kota kecamatan 3 Km dan 500 M dari fasilitas umum dan fasilitas sosial. Dimana yang menjawab setuju sebanyak 2 orang dengan persentase 11.76 %, yang menjawab cukup setuju sebanyak 5 orang dengan persentase 29.41 %, dan menjawab tidak setuju sebanyak 10 orang dengan persentase 58.83 %. Dengan demikian sebagian besar responden berpendapat bahwa pengusahaan penangkaran sarang burung walet tidak berjarak minimal dari pusat kota kecamatan 3 Km dan 500 M dari fasilitas sosial dan fasilitas sosial.

Berdasarkan pengamatan penulis di tempat penelitian, bahwasanya penangkaran sarang burung walet yang ada di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak memang tidak berada di daerah kriteria lokasi, banyak para pengusaha sarang burung walet membangun penangkarannya di daerah pemukiman masyarakat, kota kecamatan, fasilitas umum dan fasilitas sosial.

Analisa ini didukung oleh pendapat salah seorang Tokoh Masyarakat yang ada di Kecamatan Tualang yaitu Bapak Indra wijaya, dapat dilihat pada kutipan langsung wawancara penulis dengan Bapak Indra Wijaya pada Tanggal 12 November 2012, beliau mengatakan :

“pengusaha penangkaran walet yang ada di Kecamatan Tualang ini banyak yang tidak sesuai dengan tempatnya. Bisa kita lihat bangunan penangkarannya berada di pemukiman masyarakat bahkan ada didekat rumah saya. Padahal penangkaran walet yang ada di pemukiman masyarakat ini sangatlah mengganggu ketentraman masyarakat sekitar dikarenakan bunyi suara pita kaset yang diputar tanpa henti-hentinya oleh pengusaha walet”.

Setelah itu penulis ingin mendapatkan informasi yang jelas tentang masalah pelanggaran membangun penangkaran walet dengan kriteria tempat perusahaan penangkaran sarang burung walet berjarak minimal dari pusat kota kecamatan 3 Km dan 500 M dari fasilitas umum dan fasilitas sosial. Maka penulis juga melakukan wawancara dengan Bapak Sudirman salah seorang pegawai Kantor Kecamatan Tualang dia menyatakan :

“Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 4 Tahun 2008 tentang izin perusahaan penangkaran sarang burung walet kemudian diperkuat dengan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2010 tentang pedoman pelaksanaan Perda Nomor 4 Tahun 2008 memang telah disebutkan didalamnya bahwa lokasi penangkaran walet harus berjarak minimal 3 Km dari pusat kota kecamatan dan 500 M dari fasilitas umum dan fasilitas

sosial, namun saya melihat banyak pengusaha walet yang ada di Kecamatan Tualang ini tidak mengindahkan aturan ini. Malahan mayoritas bangunan penangkaran walet berada di pusat kota”.

5.2.2 Pemanenan

Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 4 Tahun 2008 tentang izin pengusahaan penangkaran sarang burung walet juga telah mengatur tentang pemanenan sarang burung walet yaitu dalam Pasal 18 dan Pasal 19 Perda Nomor 4 Tahun 2008 sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (1) disebutkan Pemegang izin Pengusahaan Penangkaran Sarang Burung Walet berhak untuk memungut/memanen Sarang Burung Walet dan memanfaatkannya.
2. Pasal 18 ayat (2) Pemanenan Sarang Burung Walet dilakukan dengan memperhatikan ketentuan pemanenan rampasan dan pemanenan tetasan.
3. Pasal 18 ayat (3) menyebutkan bahwa Dalam hal pemanenan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b di atas, harus memperhatikan :
 - a. masa panen dilaksanakan setelah anak burung walet meninggalkan sarangnya;
 - b. sarang burung walet sedang tidak berisi telur ;
 - c. dilakukan pada siang hari ;
 - d. tidak mengganggu burung walet yang sedang mengeram;
 - e. terpeliharanya habitat burung Walet;
 - f. terpeliharnya ekosistem dan pelestarian lingkungan.
4. Pasal 19 ayat (1) pemanenan sarang burung walet hanya dilakukan pada siang hari antara pukul 09.00 WIB sampai pukul 16.00 WIB.

5. Pasal 19 ayat (2) pemanenan dengan cara panen tetasan dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
6. Pasal 19 ayat (3) pemanenan dengan cara panen rampasan dilakukan 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun.

5.2.2.1 Melakukan pemanenan sarang burung walet pada siang hari antara pukul 09.00 WIB sampai pukul 16.00 WIB

Dalam hal melakukan pemanenan sarang burung walet telah diatur sedemikian rupa oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Siak yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 4 Tahun 2008 tepatnya pada Pasal 18 dan Pasal 19. Hal ini dilakukan demi mencapai keselarasan lingkungan, dan pelestarian burung walet tersebut.

Untuk mengetahui tanggapan responden mengenai apakah pengusaha walet melakukan pemanenan sarang burung walet sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh Perda Nomor 4 Tahun 2008 yaitu pada siang hari berkisar antara pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5.7
Tanggapan responden mengenai pengusaha walet melakukan pemanenan sarang burung walet sesuai dengan waktu yang telah ditentukan

No	Kategori	Jumlah	Persentase (%)
1	Setuju	14	82.35 %
2	Cukup Setuju	3	17.65 %
3	Tidak Setuju	-	-
Jumlah		17	100 %

Sumber : Data Olahan 2012

Dari tabel 5.7 di atas tanggapan responden mengenai melakukan pemanenan sarang burung walet sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah yaitu pada siang hari antara pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB. Dimana yang menjawab setuju sebanyak 14 orang dengan persentase 82.35 %, dan cukup setuju sebanyak 3 orang dengan persentase 17.65 %. Dengan demikian sebagian responden berpendapat telah melakukan pemanenan walet sesuai waktu yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

5.2.2.2 Dalam melakukan pemanenan menggunakan metode panen tetasan dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pada pasal 19 ayat 1 disebutkan bahwa pengusaha sarang burung walet diperbolehkan untuk menggunakan metode pemanenan dengan cara panen tetasan dengan tetap mematuhi ketentuan yang berlaku sebagaimana yang telah diatur dalam Perda Nomor 4 Tahun 2008.

Untuk mengetahui tanggapan responden mengenai apakah pengusaha walet dalam melakukan pemanenan sarang burung walet menggunakan metode panen tetasan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5.8
Tanggapan responden mengenai pengusaha walet melakukan pemanenan sarang burung walet menggunakan metode panen tetasan

No	Kategori	Jumlah	Persentase (%)
1	Setuju	-	-
2	Cukup Setuju	-	-
3	Tidak Setuju	17	100 %
Jumlah		17	100 %

Sumber : Data Olahan 2012

Dari tabel 5.8 di atas tanggapan responden mengenai pengusaha walet yang melakukan pemanenan sarang burung walet dengan menggunakan metode panen tetasan, dimana yang menjawab tidak setuju sebanyak 17 orang dengan persentase 100 %. Dengan demikian keseluruhan responden berpendapat bahwa dalam melakukan pemanenan sarang burung walet tidak menggunakan metode panen tetasan.

5.2.2.3 Dalam melakukan pemanenan menggunakan metode panen rampasan dilakukan 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 19 tepatnya pada ayat 3 yang berbunyi pemanenan dengan cara panen rampasan dapat dilakukan 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun. Artinya bagi pengusaha walet yang ingin melakukan pemanenan sarang burung walet bisa menggunakan metode panen rampasan.

Untuk mengetahui tanggapan responden mengenai apakah pengusaha walet dalam melakukan pemanenan sarang burung walet menggunakan metode rampasan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5.9
Tanggapan responden mengenai pengusaha walet melakukan pemanenan sarang burung walet menggunakan metode panen rampasan

No	Kategori	Jumlah	Persentase (%)
1	Setuju	17	100 %
2	Cukup Setuju	-	-
3	Tidak Setuju	-	-
Jumlah		17	100 %

Sumber : Data Olahan 2012

Dari tabel 5.9 di atas tanggapan responden mengenai melakukan pemanenan dengan metode panen rampasan, dimana yang menjawab setuju sebanyak 17 orang dengan persentase 100 %. Dengan demikian keseluruhan responden berpendapat bahwa dalam melakukan pemanenan sarang burung walet menggunakan metode panen rampasan dilakukan 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis dapatkan dari pengusaha-pengusaha penangkaran sarang burung walet di Kecamatan Tualang, rata-rata dalam 1 (satu) tahun pengusaha bisa panen sampai 3 (tiga) kali. Kemudian penulis juga memperoleh informasi dari UPTD Pendapatan Kecamatan Tualang mengenai perolehan pendapatan dari usaha penangkaran sarang burung walet dalam 2 tahun terakhir yaitu pada tahun 2010 memperoleh pendapatan sebesar Rp 32.500.000, dan pada tahun 2011 perolehannya sebesar Rp 33.336.000. Pendapatan ini baru bersumber dari satu kecamatan saja, apabila dikumpulkan dari kecamatan lainnya yang memiliki usaha penangkaran sarang burung walet tentu akan semakin bertambah PAD yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Siak bersumber dari pajak daerah. Berdasarkan hal tersebut, jika Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 4 Tahun 2008 bisa terlaksana secara optimal maka Pemerintah Daerah Kabupaten Siak berpeluang besar meningkatkan PAD bukan hanya dari pajak pendapatan penangkaran sarang burung walet yang telah ditetapkan dalam Pasal 5 Perda Nomor 23 Tahun 2010 sebesar 10 % saja, namun dari retribusi perizinan usaha penangkaran walet juga.

Dalam urusan pemanenan sarang burung walet, Pemerintah Daerah Kabupaten Siak memberikan wewenang kepada Dinas Kehutanan untuk melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan pemanenan tersebut. Setiap pemanenan sarang burung walet yang dilakukan oleh pengusaha maka harus melibatkan Dinas Kehutanan.

Namun berdasarkan hasil penelitian penulis, sampai saat ini yang terjadi di lapangan tidak sesuai dengan apa yang diatur dalam Perda Nomor 4 Tahun 2008 tersebut. Menurut keterangan dari Bapak Ermansyi (Kepala seksi pengajian dan iuran hasil hutan), belum satupun pemanenan resmi yang melibatkan Pemerintah Daerah melalui Dinas Kehutanan. Pemanenan sarang burung walet dilakukan oleh pengusaha tersebut tanpa diketahui dan diawasi oleh Dinas Kehutanan. Berikut adalah kutipan dari keterangan Bapak Ermansyi :

“Sampai saat ini belum ada satupun pemanenan sarang burung walet yang resmi melibatkan Dinas Kehutanan. Kami tidak pernah diberitahu masalah pemanenan oleh pengusaha. Selain dari pada itu kami juga tidak bisa untuk ikut andil dalam pemanenan hal ini dikarenakan oleh pengusaha walet yang ada sekarang ini masih belum memiliki izin perusahaan penangkaran sarang burung walet. Jika mereka sudah memiliki izin penangkaran baru kami bisa ikut andil dalam pemanenan sarang burung walet”.

Seharusnya dalam hal pemanenan sarang burung walet, pengusaha harus melibatkan Dinas Kehutanan. Pengusaha harus memberitahukan waktu pemanenan kepada Dinas Kehutanan, kondisi lingkungan dan jumlah sarang burung walet yang dipanen. Karena jika tidak dilaksanakan, tentu saja menyebabkan kerugian besar terhadap PAD Kabupaten Siak.

5.2.3 Pengawasan dan Pengendalian

Pengawasan dan pengendalian terhadap pengusaha penangkaran sarang burung walet dilakukan oleh Dinas Kehutanan dan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA).

Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan adalah pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan teknis pengusaha penangkaran sarang burung walet secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. Sedangkan pengawasan yang dilakukan oleh Bapedalda adalah pengawasan dan pengendalian sarang burung walet terhadap dampak lingkungan guna untuk menghindari rusaknya ekosistem dan pencemaran lingkungan. Pengawasan tersebut dilakukan secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 4 Tahun 2008 tentang izin pengusaha penangkaran sarang burung walet, pengawasan dan pengendalian tersebut diatur dalam Pasal 20, 21, dan 22 Perda Nomor 4 Tahun 2008, yaitu sebagai berikut:

1. Pasal 20 disebutkan bahwa Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pengendalian serta bimbingan teknis terhadap pengusaha penangkaran sarang burung walet.
2. Pasal 21 ayat (1) pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan teknis pengusaha penangkaran sarang burung walet dilakukan oleh Dinas Kehutanan secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
3. Pasal 21 ayat (2) pelaksanaan pengawasan dan pengendalian tersebut dilakukan terhadap kegiatan teknis pengelolaan habitat alami dan habitat

buatan ditinjau dari segi upaya pengamatan habitat dan populasi burung walet.

4. Pasal 22 ayat (1) menyebutkan pengawasan dan pengendalian sarang burung walet terhadap dampak lingkungan dilakukan oleh Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA).
5. Pasal 22 ayat (2) pelaksanaan pengawasan dan pengendalian tersebut bertujuan untuk menghindari rusaknya ekosistem dan pencemaran lingkungan.
6. Pasal 22 ayat (3) hasil pengawasan dan pengendalian tersebut dibuat dalam bentuk berita acara dan ditandatangani oleh pemilik bersama petugas dari Bapedalda yang telah ditunjuk.
7. Pasal 22 ayat (4) pengawasan dan pengendalian tersebut dilakukan secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

5.2.3.1 Pengawasan dan Pengendalian terhadap kegiatan teknis perusahaan penangkaran sarang burung walet dilakukan oleh Dinas Kehutanan secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

Pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan teknis perusahaan penangkaran sarang burung walet telah diatur dalam Perda Nomor 4 Tahun 2008. Dimana kewenangan tersebut dilimpahkan kepada Dinas Kehutanan.

Untuk mengetahui tanggapan responden mengenai apakah pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan teknis perusahaan telah dilakukan oleh Dinas Kehutanan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5.10
Tanggapan responden mengenai pengawasan dan pengendalian terhadap
kegiatan teknis pengusahaan oleh Dinas Kehutanan

No	Kategori	Jumlah	Persentase (%)
1	Setuju	-	-
2	Cukup Setuju	-	-
3	Tidak Setuju	17	100 %
Jumlah		17	100 %

Sumber : Data Olahan 2012

Dari tabel 5.10 di atas tanggapan responden mengenai pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan teknis pengusahaan penangkaran sarang burung walet telah dilakukan oleh Dinas Kehutanan, dimana yang menjawab tidak setuju sebanyak 17 orang dengan persentase 100 %. Dengan demikian keseluruhan responden berpendapat bahwa pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan teknis pengusahaan penangkaran sarang burung walet oleh Dinas Kehutanan tidak pernah dilakukan di Kecamatan Tualang. Hal ini bisa terjadi karena pengusaha walet dalam melakukan pengusahaannya belum memiliki izin dari Pemerintah Daerah.

Analisa ini didukung berdasarkan hasil penelitian penulis di Dinas Kehutanan. Sampai saat ini yang terjadi di lapangan tidak sesuai dengan apa yang diatur dalam Perda Nomor 4 tahun 2008 tersebut. Dinas Kehutanan belum pernah melakukan pengawasan dan pengendalian tersebut.

Untuk mencari informasi lebih lanjutnya penulis mengutip hasil wawancara dengan salah seorang pegawai Dinas Kehutanan yaitu Bapak Ermansyi (Kepala Seksi Pengajian dan Iuran Hasil Hutan), dari Bapak Ermansyi

penulis mendapatkan jawaban mengapa Dinas Kehutanan belum pernah melakukan pengawasan dan pengendalian tersebut. Berikut kutipan langsung pernyataan dari Bapak Ermansyi :

“Sampai saat ini kami dari Dinas Kehutanan memang belum ada melakukan pengawasan terhadap penangkaran sarang burung walet, kami tidak bisa melakukan pengawasan karena pengusaha walet tersebut belum memiliki izin pengusahaan, Perda Nomor 4 tahun 2008 itu sendiri tidak jalan sampai sekarang, jadi untuk apa dilakukan pengawasan”.

Berdasarkan pendapat Bapak Ermansyi tersebut terlihat jelas bahwa Dinas Kehutanan tidak melaksanakan tugasnya dengan baik. Padahal Dinas Kehutanan telah diberikan kepercayaan untuk melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan teknis pengusahaan penangkaran sarang burung walet. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 4 Tahun 2008 memang sudah jelas tidak terlaksana khususnya pada bab pengawasan dan pengendalian oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Siak.

5.2.3.2 Pengawasan dan Pengendalian sarang burung walet terhadap dampak lingkungan dilakukan oleh Bapedalda secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

Pengawasan dan pengendalian sarang burung walet terhadap dampak lingkungan telah diatur dalam Perda Nomor 4 Tahun 2008. Dimana kewenangan tersebut dilimpahkan kepada Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA).

Untuk mengetahui tanggapan responden mengenai apakah pengawasan dan pengendalian sarang burung walet terhadap dampak lingkungan telah dilakukan oleh Bapedalda dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5.11
Tanggapan responden mengenai pengawasan dan pengendalian sarang burung walet terhadap dampak lingkungan oleh Bapedalda

No	Kategori	Jumlah	Persentase (%)
1	Setuju	-	-
2	Cukup Setuju	-	-
3	Tidak Setuju	17	100 %
Jumlah		17	100 %

Sumber : Data Olahan 2012

Dari tabel 5.11 di atas tanggapan responden mengenai pengawasan dan pengendalian sarang burung walet terhadap dampak lingkungan telah dilakukan oleh Bapedalda, dimana yang menjawab tidak setuju sebanyak 17 orang dengan persentase 100 %. Dengan demikian keseluruhan responden berpendapat bahwa pengawasan dan pengendalian sarang burung walet terhadap dampak lingkungan belum pernah dilakukan oleh Bapedalda di Kecamatan Tualang.

Untuk mencari tahu kebenaran akan hal tersebut penulis juga mengutip hasil wawancara kepada salah seorang pegawai Bapedalda yaitu Bapak Agus (Kabid. Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah) Kabupaten Siak. Bapak Agus mengatakan bahwa mereka dari Bapedalda belum pernah melakukan pengawasan tersebut, alasannya hampir sama dengan dengan Dinas Kehutanan yaitu Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 masih belum ada kejelasan sampai saat ini. Berikut adalah kutipan dari hasil wawancara dengan Bapak Agus :

“Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 sampai saat ini masih belum ada kejelasan, karena pengusaha walet belum memiliki izin usaha sampai saat ini. Oleh karena itu, kami memang belum pernah melakukan pengawasan mengenai dampak lingkungan terhadap pelaksanaan penangkaran sarang burung walet”.

Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa Bapedalda sebagai salah satu Dinas yang diberikan wewenang untuk melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 pada bab pengawasan dan pengendalian sarang burung walet terhadap dampak lingkungan tidak konsisten dengan tugasnya. Dari pernyataan Bapak Agus terlihat bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 4 Tahun 2008 belum terlaksana. Terkendala pada pengeluaran izin bagi pengusaha penangkaran walet.

5.2.3.3 Mendapatkan sosialisasi dari Pemerintah Daerah mengenai Perda Nomor 4 Tahun 2008 tentang izin pengusahaan penangkaran sarang burung walet.

Menurut J.A.M Marse dalam (Tangkilisan, 2004:10), mengatakan bahwa ada beberapa faktor yang dapat menimbulkan kegagalan dalam implementasi suatu kebijakan, salah satunya adalah informasi. Terjadinya kekurangan informasi, maka dengan mudah mengakibatkan adanya gambaran yang kurang tepat, baik kepada objek kebijakan maupun kepada para pelaksana dari isi kebijakan yang akan dilaksanakan dan hasil-hasil daripada kebijakan tersebut.

Oleh karena itu untuk mencapai keberhasilan daripada implementasi ini diperlukan kesamaan pandangan atas tujuan yang hendak dicapai dan komitmen semua pihak untuk memberikan dukungan bagi pelaksanaannya. Keberhasilan implementasi kebijakan ini dapat dilihat dari terjadinya kesesuaian antara

pelaksanaan atau penerapan kebijakan dengan desain, tujuan dan sasaran kebijakan itu sendiri serta memberikan dampak atau hasil yang positif bagi pemecahan permasalahan yang dihadapi.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kriteria lokasi, lokasi penangkaran yang diprioritaskan dan lokasi yang dilarang untuk membangun penangkaran sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2010 tentang pedoman pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 4 Tahun 2008 yaitu terdapat pada Pasal 2 dan Pasal 3 disebutkan kriteria lokasi penangkaran sarang burung walet adalah sebagai berikut, (1) jarak minimal dari pusat kota kecamatan 3 Km dan 500 M dari fasilitas umum dan fasilitas sosial, (2) kepadatan penduduk rendah sampai sedang dan, (3) lahan terlantar dan/atau bukan lahan produktif. Pasal 3 disebutkan untuk Kecamatan Tualang lokasi yang diprioritaskan berada di Desa Pinang Sebatang Barat, Desa Pinang Sebatang Timur dan Desa Tualang. Dimana ada beberapa dari pengusaha walet yang mengaku tidak tahu menahu tentang hal tersebut. Penulis mengamati bahwa ada ketidak pahaman bagi pengusaha walet yang ada di Kecamatan Tualang tentang masalah kriteria lokasi dan lokasi yang diprioritaskan, disebabkan kurangnya sosialisasi oleh Pemerintah Daerah terhadap Peraturan daerah Nomor 4 Tahun 2008 kepada pengusaha walet.

Untuk melihat tanggapan responden mengenai apakah pengusaha penangkaran sarang burung walet mendapatkan sosialisasi dari Pemerintah daerah terkait Perda Nomor 4 Tahun 2008 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5.12
Tanggapan responden mengenai mendapatkan sosialisasi dari Pemerintah
Daerah terkait Perda Nomor 4 Tahun 2008

No	Kategori	Jumlah	Persentase (%)
1	Setuju	5	29.41 %
2	Cukup Setuju	2	11.76 %
3	Tidak Setuju	10	58.83 %
Jumlah		17	100 %

Sumber : Data Olahan 2012

Dari tabel 5.12 di atas tanggapan responden mengenai pengusaha penangkaran sarang burung walet mendapatkan sosialisasi dari Pemerintah daerah terhadap Peraturan daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Izin pengusaha penangkaran sarang burung walet terkait tentang kriteria lokasi dan lokasi yang diprioritaskan bagi penangkaran sarang burung walet di Kecamatan Tualang, dimana yang menjawab setuju sebanyak 5 orang dengan persentase 29.41 %, menjawab cukup setuju sebanyak 2 orang dengan persentase 11.76 %, dan menjawab tidak setuju sebanyak 10 orang dengan persentase 58.83 %. Dengan demikian sebagian besar responden berpendapat belum mendapatkan sosialisasi dari Pemerintah Daerah terhadap Peraturan daerah Nomor 4 tahun 2008.

5.2.4 Kewajiban

Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 4 Tahun 2008 juga mengatur tentang kewajiban pengusaha penangkaran walet. Kewajiban-kewajiban pengusaha walet tersebut diatur dalam Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 4 Tahun 2008 sebagai berikut :

1. Pasal 23 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap orang atau Badan Usaha Penangkaran Sarang Burung Walet berkewajiban untuk :
 - a. Mendapatkan izin dari Kepala Daerah.
 - b. Melaksanakan pelestarian, pengembangan habitat dan populasi burung walet.
 - c. Membuat dan menyampaikan laporan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas Kehutanan.
 - d. Membuat dan menyampaikan laporan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali tentang pengelolaan lingkungan kepada Kepala Daerah melalui Bapedalda.
 - e. Menjaga dan memelihara keseimbangan dan kelestarian lingkungan agar masyarakat terhindar dari bahaya pencemaran.
 - f. Mentaati segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Pasal 23 ayat (2) setiap pemanenan sarang burung walet wajib dicatat dan dilaporkan tertulis kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas Kehutanan.
3. Pasal 23 ayat (3) laporan tersebut mencakup tentang waktu, kondisi lingkungan, dan jumlah sarang burung walet yang dipanen.

5.2.4.1 Membuat dan menyampaikan laporan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas Kehutanan.

Pasal 23 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 4 Tahun 2008 menyebutkan bahwa setiap pengusaha walet dalam melakukan pengusaha

penangkaran sarang burung walet harus mematuhi ketentuan yang berlaku salah satunya adalah membuat dan menyampaikan laporan berkala.

Untuk mengetahui tanggapan responden mengenai apakah pengusaha walet telah membuat dan menyampaikan laporan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas Kehutanan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5.13
Tanggapan responden mengenai telah membuat dan menyampaikan laporan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas Kehutanan

No	Kategori	Jumlah	Persentase (%)
1	Setuju	-	-
2	Cukup Setuju	-	-
3	Tidak Setuju	17	100 %
Jumlah		17	100 %

Sumber : Data Olahan 2012

Dari tabel 5.13 di atas tanggapan responden mengenai pengusaha walet telah membuat dan menyampaikan laporan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas Kehutanan, dimana yang menjawab tidak setuju sebanyak 17 orang dengan persentase 100 %. Dengan demikian keseluruhan responden berpendapat bahwa tidak pernah membuat dan menyampaikan laporan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas Kehutanan.

5.2.4.2 Membuat dan menyampaikan laporan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali tentang pengelolaan lingkungan kepada Kepala Daerah melalui Bapedalda.

Pasal 23 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 4 Tahun 2008 menyebutkan bahwa setiap pengusaha walet dalam melakukan pengusahaan penangkaran sarang burung walet harus mematuhi ketentuan yang berlaku yaitu membuat dan menyampaikan laporan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali tentang pengelolaan lingkungan kepada Kepala Daerah melalui Bapedalda.

Untuk mengetahui tanggapan responden mengenai apakah pengusaha walet telah membuat dan menyampaikan laporan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali tentang pengelolaan lingkungan kepada Bapedalda dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5.14
Tanggapan responden mengenai telah membuat dan menyampaikan laporan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali tentang pengelolaan lingkungan kepada Kepala Daerah melalui Bapedalda

No	Kategori	Jumlah	Persentase (%)
1	Setuju	-	-
2	Cukup Setuju	-	-
3	Tidak Setuju	17	100 %
Jumlah		17	100 %

Sumber : Data Olahan 2012

Dari tabel 5.14 di atas tanggapan responden mengenai pengusaha walet telah membuat dan menyampaikan laporan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali tentang pengelolaan lingkungan kepada Kepala Daerah melalui Bapedalda, dimana yang menjawab tidak setuju sebanyak 17 orang dengan persentase 100 %. Dengan demikian keseluruhan responden berpendapat bahwa tidak pernah

membuat dan menyampaikan laporan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Kepala Daerah melalui Bapedalda.

5.2.4.3 Setiap pemanenan sarang burung walet dicatat dan dilaporkan kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas Kehutanan.

Pada Pasal 23 ayat (2) dalam Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 4 Tahun 2008 disebutkan bahwa setiap pemanenan sarang burung walet wajib dicatat dan dilaporkan tertulis kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas Kehutanan. Ketentuan ini wajib dilakukan oleh setiap pengusaha penangkaran sarang burung walet.

Untuk mengetahui tanggapan responden mengenai apakah pengusaha walet telah melaksanakan kewajibannya tentang setiap pemanenan sarang burung walet dicatat dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Kehutanan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5.15
Tanggapan responden mengenai setiap pemanenan sarang burung walet telah dicatat dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Kehutanan

No	Kategori	Jumlah	Persentase (%)
1	Setuju	-	-
2	Cukup Setuju	-	-
3	Tidak Setuju	17	100 %
Jumlah		17	100 %

Sumber : Data Olahan 2012

Dari tabel 5.15 di atas tanggapan responden mengenai setiap pemanenan sarang burung walet telah dicatat dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Kehutanan, dimana yang menjawab tidak setuju sebanyak 17 orang dengan persentase 100 %.

Dengan demikian keseluruhan responden berpendapat bahwa setiap pemanenan sarang burung walet belum pernah dicatat dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Kehutanan.

Dalam urusan pemanenan sarang burung walet, Pemerintah Daerah Kabupaten Siak memberikan wewenang kepada Dinas Kehutanan untuk melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan pemanenan tersebut. Setiap pemanenan sarang burung walet yang dilakukan oleh pengusaha maka harus melibatkan Dinas Kehutanan sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan daerah Nomor 4 Tahun 2008.

Namun berdasarkan hasil penelitian penulis dilapangan, sampai saat ini yang terjadi di lapangan tidak sesuai dengan apa yang diatur dalam Perda Nomor 4 Tahun 2008 tersebut. Menurut keterangan dari Bapak Ermansyi (Kepala seksi pengajian dan iuran hasil hutan) Dinas Kehutanan Kabupaten Siak pada paragraf sebelumnya, menyatakan bahwa belum satupun pemanenan resmi yang melibatkan Pemerintah Daerah melalui Dinas Kehutanan. Pemanenan sarang burung walet dilakukan oleh pengusaha tersebut tanpa diketahui dan diawasi oleh Dinas Kehutanan.

Seharusnya dalam hal pemanenan sarang burung walet, pengusaha harus melibatkan Dinas Kehutanan. Pengusaha harus memberitahukan waktu pemanenan kepada Dinas Kehutanan, kondisi lingkungan dan jumlah sarang burung walet yang dipanen. Karena jika tidak dilaksanakan, tentu saja menyebabkan kerugian besar terhadap PAD Kabupaten Siak.

5.3 Rekapitulasi jawaban responden mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 4 Tahun 2008 tentang izin pengusahaan penangkaran sarang burung walet di Kecamatan Tualang.

Secara keseluruhan, rekapitulasi dan analisis hasil penelitian terhadap masing-masing sub variabel penelitian mengenai Implementasi Perda Nomor 4 Tahun 2008 tentang izin pengusahaan penangkaran sarang burung walet di Kecamatan Tualang adalah sebagai berikut :

5.3.1 Perizinan

Tabel 5.16
Rekapitulasi jawaban responden mengenai perizinan

No	Indikator	Tanggapan Responden			Persentase (%)
		Setuju	Cukup Setuju	Tidak Setuju	
1	Persyaratan pengajuan permohonan	-	-	17	100 %
2	Pusat Kota Kecamatan Tualang yaitu kelurahan Perawang tidak termasuk daerah penangkaran walet.	2	4	11	100 %
3	Lokasi penangkaran berjarak minimal dari pusat kota kecamatan 3 Km dan 500 m dari fasilitas umum dan fasilitas sosial.	2	5	10	100 %
Jumlah		4	9	38	100 %
Rata-rata		1,33	3	12,67	17
Persentase Rata-rata		7,84 %	17,65%	74,51%	100 %

Sumber : Data Olahan 2012

Dari tabel rekapitulasi hasil penelitian mengenai implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 4 Tahun 2008 tentang izin pengusahaan penangkaran sarang burung walet di Kecamatan Tualang tepatnya pada indikator

Perizinan yang terdiri dari tiga sub indikator, dapat diketahui bahwa tanggapan responden yang menyatakan setuju 4, kemudian yang menyatakan cukup setuju jumlahnya 9, dan yang menyatakan tidak setuju jumlahnya 38.

Kemudian untuk mengetahui apakah perizinan sesuai dengan peraturan yang berlaku adalah dengan mengetahui jumlah rata-rata dari masing-masing jawaban responden, dan dari penjumlahan masing-masing tanggapan responden dan dibagi jumlah indikator maka diketahui bahwa tanggapan responden yang menyatakan setuju dengan rata-rata adalah 1,33 persentase 7,84 %, dan responden yang menyatakan cukup setuju rata-rata adalah 3 dengan persentase 17,65 %, dan responden yang menyatakan tidak setuju rata-rata adalah 12,67 dengan persentase 74,51 %. Dengan demikian, berdasarkan penjumlahan dari 3 sub indikator yang diteliti, maka diketahui bahwa perizinan yang seharusnya dimiliki oleh setiap pengusaha yang melakukan usaha penangkaran sarang burung walet di wilayah Kabupaten Siak belum mengacu kepada aturan yang berlaku sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 4 Tahun 2008 mengacu pada rata-rata 12,67 dengan persentase 74,51 % responden menyatakan tidak setuju.

5.3.2 Pemanenan

Tabel 5.17
Rekapitulasi jawaban responden mengenai pemanenan

No	Indikator	Tanggapan Responden			Persentase (%)
		Setuju	Cukup Setuju	Tidak Setuju	
1	Pemanenan sarang burung walet hanya dilakukan pada siang hari antara pukul 09.00 sampai dengan pukul 16.00 WIB.	14	3	-	100 %
2	Pemanenan dengan cara panen tetasan dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.	-	-	17	100 %
3	Pemanenan dengan cara panen rampasan dapat dilakukan 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun.	17	-	-	100 %
Jumlah		31	3	17	100 %
Rata-rata		10,33	1	5,67	17
Persentase Rata-rata		60,79%	5,88 %	33,33%	100 %

Sumber : Data Olahan 2012

Dari tabel rekapitulasi hasil penelitian mengenai implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 4 Tahun 2008 tentang izin pengusahaan penangkaran sarang burung walet di Kecamatan Tualang tepatnya pada indikator Pemanenan yang terdiri dari tiga sub indikator, dapat diketahui bahwa tanggapan responden yang menyatakan setuju 31, kemudian yang menyatakan cukup setuju jumlahnya 3, dan yang menyatakan tidak setuju jumlahnya 17.

Kemudian untuk mengetahui apakah pemanenan sesuai dengan peraturan yang berlaku adalah dengan mengetahui jumlah rata-rata dari masing-masing jawaban responden, dan dari penjumlahan masing-masing tanggapan responden dan dibagi jumlah indikator maka diketahui bahwa tanggapan responden yang

menyatakan setuju dengan rata-rata adalah 10,33 persentase 60,79 %, dan responden yang menyatakan cukup setuju rata-rata adalah 1 dengan persentase 5,88 %, dan responden yang menyatakan tidak setuju rata-rata adalah 5,67 dengan persentase 33,33 %. Dengan demikian, berdasarkan penjumlahan dari 3 sub indikator yang diteliti, maka diketahui bahwa dalam melakukan pemanenan sebagian besar pengusaha walet mengacu kepada aturan yang berlaku dimana pada angka rata-rata berjumlah 10,33 dengan persentase 60,79 % responden menyatakan setuju.

5.3.3 Pengawasan dan Pengendalian

Tabel 5.18

Rekapitulasi jawaban responden mengenai pengawasan dan pengendalian

No	Indikator	Tanggapan Responden			Persentase (%)
		Setuju	Cukup Setuju	Tidak Setuju	
1	Pengawasan dan pengendalian kegiatan teknis perusahaan penangkaran walet oleh Dinas Kehutanan secara berkala minimal 1 kali dalam 3 bulan.	-	-	17	100 %
2	Pengawasan dan pengendalian walet terhadap dampak lingkungan dilakukan oleh BAPEDALDA secara berkala minimal 1 kali dalam 3 bulan.	-	-	17	100 %
3	Melakukan sosialisasi Perda Nomor 4 Tahun 2008 kepada pengusaha walet dan masyarakat.	5	2	10	100 %
Jumlah		5	2	44	100 %
Rata-rata		1,67	0,67	14,66	17
Persentase Rata-rata		9,80 %	3,92 %	86,28%	100 %

Sumber : Data Olahan 2012

Dari tabel rekapitulasi hasil penelitian mengenai implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 4 Tahun 2008 tentang izin pengusahaan penangkaran sarang burung walet di Kecamatan Tualang tepatnya pada indikator Pengawasan dan Pengendalian yang terdiri dari tiga sub indikator, dapat diketahui bahwa tanggapan responden yang menyatakan setuju 5, kemudian yang menyatakan cukup setuju jumlahnya 2, dan yang menyatakan tidak setuju jumlahnya 44.

Kemudian untuk mengetahui apakah pengawasan dan pengendalian telah dilakukan oleh pihak-pihak yang telah diberikan wewenang yaitu Dinas Kehutanan dan Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP) adalah dengan mengetahui jumlah rata-rata dari masing-masing jawaban responden, dan dari penjumlahan masing-masing tanggapan responden dan dibagi jumlah indikator maka diketahui bahwa tanggapan responden yang menyatakan setuju dengan rata-rata adalah 1,67 persentase 9,80 %, dan responden yang menyatakan cukup setuju rata-rata adalah 0,67 dengan persentase 3,92 %, dan responden yang menyatakan tidak setuju rata-rata adalah 14,66 dengan persentase 86,28 %. Dengan demikian, berdasarkan penjumlahan dari 3 sub indikator yang diteliti, maka diketahui bahwa pengawasan dan pengendalian baik oleh Dinas Kehutanan dan Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP) belum pernah dilakukan terhadap pengusahaan penangkaran sarang burung walet mengacu pada rata-rata 14,66 dengan persentase 86,28 % responden yang menyatakan tidak setuju.

5.3.4 Kewajiban

Tabel 5.19
Rekapitulasi jawaban responden mengenai kewajiban

No	Indikator	Tanggapan Responden			Persentase (%)
		Setuju	Cukup Setuju	Tidak Setuju	
1	Membuat dan menyampaikan laporan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada kepala daerah melalui kepala dinas kehutanan.	-	-	17	100 %
2	Membuat dan menyampaikan laporan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali tentang pengelolaan lingkungan kepada kepala daerah melalui Bapedalda.	-	-	17	100 %
3	Setiap pemanenan sarang burung walet wajib dicatat dan dilaporkan tertulis kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas Kehutanan.	-	-	17	100 %
Jumlah		-	-	51	100 %
Rata-rata		-	-	17	17
Persentase Rata-rata		-	-	100 %	100 %

Sumber : Data Olahan 2012

Dari tabel rekapitulasi hasil penelitian mengenai implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 4 Tahun 2008 tentang izin pengusahaan penangkaran sarang burung walet di Kecamatan Tualang tepatnya pada indikator Kewajiban yang terdiri dari tiga sub indikator, dapat diketahui bahwa tanggapan responden yang menyatakan tidak setuju jumlahnya 51.

Kemudian untuk mengetahui apakah pengusaha penangkaran walet telah menjalankan kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku adalah dengan

mengetahui jumlah rata-rata dari masing-masing jawaban responden, dan dari penjumlahan masing-masing tanggapan responden dan dibagi jumlah indikator maka diketahui bahwa tanggapan responden yang menyatakan tidak setuju dengan rata-rata adalah 17 persentase 100 %. Dengan demikian, berdasarkan penjumlahan dari 3 sub indikator yang diteliti, maka diketahui bahwa pengusaha penangkaran walet belum menjalankan kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagaimana disebutkan dalam Perda Nomor 4 Tahun 2008 mengacu pada rata-rata 17 dengan persentase 100 % responden menyatakan tidak setuju.

5.4 Rekapitulasi Keseluruhan Quesioner

Tabel 5.20
Rekapitulasi keseluruhan quesioner penelitian

No	Indikator	Tanggapan Responden			Persentase (%)
		Setuju	Cukup Setuju	Tidak Setuju	
1	Perizinan	4	9	38	100 %
2	Pemanenan	31	3	17	100 %
3	Pengawasan dan Pengendalian	5	2	44	100 %
4	Kewajiban	-	-	51	100 %
Jumlah		40	14	150	100 %
Rata-rata		10	3.5	37.5	100 %
Persentase (%)		19.61%	6.86 %	73.53%	100 %

Sumber : Data Olahan 2012

Selanjutnya, dari tabel rekapitulasi di atas dapat diketahui bahwa empat indikator yang diteliti dari variabel penelitian Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 4 Tahun 2008 tentang izin pengusaha penangkaran sarang burung walet di Kecamatan Tualang yang terdiri dari perizinan, pemanenan, pengawasan dan pengendalian, serta kewajiban. Maka dapat dilihat

bahwa tanggapan responden yang menyatakan setuju sebanyak 40, kemudian yang menyatakan cukup setuju dengan jumlah 14 dan menyatakan tidak setuju sebanyak 150.

Responden memberikan tanggapan tidak setuju berjumlah 150 atau 73,53 % yang didominasi oleh indikator kewajiban (tanggapan berjumlah 51) dengan alasan Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 4 Tahun 2008 tentang izin pengusahaan penangkaran sarang burung walet di Kecamatan Tualang pada bab kewajiban ini belum pernah dilaksanakan oleh pengusaha walet baik dalam Membuat dan menyampaikan laporan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Kepala Daerah melalui kepala Dinas Kehutanan, Membuat dan menyampaikan laporan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali tentang pengelolaan lingkungan kepada kepala daerah melalui Bapedalda, dan Setiap pemanenan sarang burung walet wajib dicatat dan dilaporkan tertulis kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas Kehutanan.

Sementara itu, untuk tanggapan setuju ditanggapi sebanyak 40 dengan didominasi oleh indikator Pemanenan (ditanggapi sebanyak 41) dengan alasan bahwa sebagian besar pengusaha walet yang ada di Kecamatan Tualang dalam melakukan pemanenan sudah cukup sesuai dengan ketentuan dari Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 baik tentang waktu pemanenan sarang burung walet dilakukan pada siang hari antara pukul 09.00 sampai dengan pukul 16.00 WIB, maupun penggunaan metode pemanenan dengan cara panen rampasan dilakukan 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun.

Selanjutnya untuk tanggapan cukup setuju ditanggapi sebanyak 14 yang didominasi oleh indikator Perizinan (ditanggapi sebanyak 9) dengan alasan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 4 Tahun 2008 tentang izin pengusahaan penangkaran sarang burung walet di Kecamatan Tualang pada bab perizinan masih kurang terlaksana. Baik tentang memiliki perizinan usaha penangkaran sarang burung walet, maupun tentang kesesuaian antara kriteria lokasi penangkaran sarang burung walet dengan lokasi penangkaran sarang burung walet yang dibangun oleh pengusaha walet.

Dari hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 4 Tahun 2008 tentang izin pengusahaan penangkaran sarang burung walet di Kecamatan Tualang belum terlaksana dengan baik.

BAB VI

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta analisa yang telah dilakukan penulis mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 4 Tahun 2008 tentang izin pengusahaan penangkaran sarang burung walet di Kecamatan Tualang, maka penulis dapat mengambil kesimpulan dan sebagai pelengkap, penulis akan mengemukakan saran untuk bahan masukan bagi pihak yang berkepentingan.

6.1 Kesimpulan

Hasil penelitian penulis mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 4 Tahun 2008 tentang izin pengusahaan penangkaran sarang burung walet di Kecamatan Tualang adalah dengan melihat hasil dari rekapitulasi masing-masing indikator. Dimana dalam penelitian ini penulis menggunakan 4 (empat) indikator, yaitu perizinan, pemanenan, pengawasan dan pengendalian, dan kewajiban. Baru kemudian disimpulkan dengan melihat hasil rekapitulasi secara keseluruhan.

Adapun kesimpulan hasil penelitian penulis menyimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 4 Tahun 2008 tentang izin pengusahaan penangkaran sarang burung walet di Kecamatan Tualang **belum terlaksana dengan baik**. Hal ini terbukti dengan hasil penelitian yang dilakukan penulis sebagai berikut :

1. Perizinan, setelah melakukan penelitian maka penulis mendapatkan hasil untuk indikator perizinan ini, maka diketahui bahwa tanggapan responden yang menyatakan setuju dengan rata-rata adalah 1,33 persentase 7,84 %, dan responden yang menyatakan cukup setuju rata-rata adalah 3 dengan persentase 17,65 %, dan responden yang menyatakan tidak setuju rata-rata adalah 12,67 dengan persentase 74,51 %. Dengan demikian, pengusaha yang melakukan usaha penangkaran sarang burung walet di wilayah Kabupaten Siak belum mengacu kepada aturan yang berlaku sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 4 Tahun 2008 mengacu pada rata-rata 12,67 dengan persentase 74,51 % responden menyatakan tidak setuju.
2. Pemanenan, setelah melakukan penelitian maka penulis memperoleh hasil bahwa tanggapan responden yang menyatakan setuju dengan rata-rata adalah 10,33 persentase 60,79 %, dan responden yang menyatakan cukup setuju rata-rata adalah 1 dengan persentase 5,88 %, dan responden yang menyatakan tidak setuju rata-rata adalah 5,67 dengan persentase 33,33 %. Dengan demikian, maka diketahui bahwa dalam melakukan pemanenan sebagian besar pengusaha walet mengacu kepada aturan yang berlaku dimana pada angka rata-rata berjumlah 10,33 dengan persentase 60,79 % responden menyatakan setuju.
3. Pengawasan dan Pengendalian, setelah melakukan penelitian maka penulis memperoleh hasil bahwa tanggapan responden yang menyatakan setuju dengan rata-rata adalah 1,67 persentase 9,80 %, dan responden yang

menyatakan cukup setuju rata-rata adalah 0,67 dengan persentase 3,92 %, dan responden yang menyatakan tidak setuju rata-rata adalah 14,66 dengan persentase 86,28 %. Dengan demikian, berdasarkan penjumlahan dari 3 indikator yang diteliti, maka diketahui bahwa pengawasan dan pengendalian baik oleh Dinas Kehutanan dan Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP) belum pernah dilakukan terhadap pengusaha penangkaran sarang burung walet mengacu pada rata-rata 14,66 dengan persentase 86,28 % responden yang menyatakan tidak setuju.

4. Kewajiban, setelah melakukan penelitian maka penulis memperoleh hasil bahwa tanggapan responden yang menyatakan tidak setuju dengan rata-rata adalah 17 persentase 100 %. Dengan demikian, berdasarkan penjumlahan dari 3 indikator yang diteliti, maka diketahui bahwa pengusaha penangkaran walet belum menjalankan kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagaimana disebutkan dalam Perda Nomor 4 Tahun 2008 mengacu pada rata-rata 17 dengan persentase 100 % responden menyatakan tidak setuju.

Untuk mengetahui hasil penelitian secara keseluruhan adalah dengan melihat hasil rekapitulasi keseluruhan dari indikator penelitian. Diketahui bahwa tanggapan responden yang menyatakan setuju dengan rata-rata 10 persentase 19,61 %, kemudian menyatakan cukup setuju rata-rata 3,5 dengan persentase 6,86 %, dan yang menyatakan tidak setuju dengan rata-rata adalah 37,5 persentase 73,53 %. Dengan demikian, berdasarkan penjumlahan dari 4 indikator yang diteliti, maka diketahui bahwa pengusaha penangkaran walet yang ada di

Kecamatan Tualang Kabupaten Siak dalam melakukan pengusahaan penangkaran walet belum sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 4 Tahun 2008 tentang izin pengusahaan penangkaran sarang burung walet, mengacu pada rata-rata 37,5 dengan persentase 73,53 % responden menyatakan tidak setuju. Artinya Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 4 Tahun 2008 tentang izin pengusahaan penangkaran sarang burung walet di Kecamatan Tualang belum terlaksana dengan baik.

6.2 Saran

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Siak harus melakukan pengecekan ulang terhadap Perda Kabupaten Siak Nomor 4 Tahun 2008. Sehingga penangkaran sarang burung walet yang menjamur di pemukiman masyarakat dapat segera diselesaikan.
2. Seharusnya Pemerintah Daerah Kabupaten Siak dan instansi-instansi terkait harus berkoordinasi secepatnya untuk melakukan relokasi tempat penangkaran sarang burung walet, sehingga penangkaran sarang burung walet di pemukiman masyarakat dapat segera teratasi dan izin pengusahaan penangkaran sarang burung walet bisa dikeluarkan dan PAD Kabupaten Siak bertambah dari penerimaan retribusi perizinan dan pajak pendapatan penangkaran sarang burung walet.
3. Pengawasan terhadap Perda tersebut harus selalu dilakukan untuk menghindari penyelewengan-penyelewengan dan penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.

4. Pemerintah semestinya memberikan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran Peraturan Daerah harus dilaksanakan tanpa terkecuali.
5. Pemerintah Daerah semestinya memberikan sosialisasi kepada para pengusaha penangkaran sarang burung walet dan juga masyarakat mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 4 Tahun 2008 tentang izin pengusahaan penangkaran sarang burung walet dan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2010 agar terciptanya ketertiban serta pemahaman pengusaha ketika melakukan usaha penangkaran sarang burung walet.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Rozali. 2005. *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*: Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada
- Abdul Wahab, Solichin. 2004. *Analisis Kebijaksanaan*: Jakarta. Bumi Aksara
- Afrizal. 2009. *Administrasi Keuangan Negara dan Daerah*: Pekanbaru. UIN SUSKA RIAU
- Dunn, William. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*: Yogyakarta. Gajah Mada University Press.
- Halim, Hamzah, dkk. 2009. *Cara Praktis Menyusun dan Merancang Peraturan Daerah*: Jakarta. Kencana.
- Islamy, Irfan. 2003. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*: Jakarta. Bumi Aksara
- Kencana Syafi'ie, Inu. 2004. *Ilmu Pemerintahan dan Al-Quran*: Jakarta. Bumi Aksara
- Nugroho, Riant. 2006. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi* : Jakarta. PT Alex Komputindo.
- Pasalong Harbani, 2008. *Teori Administrasi Publik*: Bandung. Alfabeta.
- Sugiyono, 2007. *Metode Penelitian Administrasi*: Bandung, Alfabeta.
- Suharto, Edi. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*: Bandung, Alfabeta.
- Shihab, M Quraish. 2002. *Tafsir Al-Mishbah*: Jakarta, Lentera Hati.

Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2004. *Kebijakan dan Manajemen Otonomi Daerah*: Yogyakarta. Lukman Offset.

Thoha, Miftah. 2003. *Dimensi-dimensi Ilmu Administrasi Negara*: Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.

_____. 2008. *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*: Jakarta. Kencana.

Umar, Husein. 2004. *Metode riset Ilmu Administrasi*: Jakarta. PT Gramedia Pustaka Utama.

Widjaja, HAW, 2002. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*: Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.

Widya Wicaksono, Kristian. 2006. *Administrasi dan Birokrasi*: Yogyakarta. Graha Ilmu.

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 4 Tahun 2008 tentang Izin Pengusahaan Penangkaran Sarang Burung Walet.

Peraturan Bupati Kabupaten Siak Nomor 26 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 4 Tahun 2008 tentang Izin Pengusahaan Penangkaran Sarang Burung Walet.